

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2020



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2020

ISBN : 978-602-0715-28-5
No Publikasi : 72010.2123
Katalog : 4102004.7201
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 82 halaman

Naskah: :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Gambar Kulit: :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Diterbitkan oleh: :
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Imron Taufik J. Musa, S.Si, M.Si

Penyunting:

Putri Nurhardiyanti, SST

Penulis:

Putri Nurhardiyanti, SST

Pengolah Data:

Putri Nurhardiyanti, SST

Gambar Kulit:

Putri Nurhardiyanti, SST

<https://bangkepka.ms.id>

KATA PENGANTAR

Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka BPS Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan 2020.

Publikasi ini selanjutnya merupakan produk tahunan BPS Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyajikan data kondisi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan. Data untuk analisis indikator kesejahteraan rakyat ini sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Salakan, Desember 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



IMRON TAUFIK J. MUSA, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
BAB 1 KARAKTERISTIK PENDUDUK	1
Perkembangan Penduduk	3
Komposisi Penduduk dan Tantangan Menghadapi Bonus Demografi	5
Usia Wanita Kawin Pertama dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran	8
BAB 2 CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN	11
Perkembangan Capaian Pendidikan	14
Kemampuan Membaca dan Menulis Perempuan Lebih Rendah Dibandingkan dengan Laki - Laki	20
Sarana dan Prasarana Pendidikan Ditingkatkan.....	23
BAB 3 TANTANGAN BIDANG KESEHATAN	27
Morbiditas sebagai Gambaran Resistensi Masyarakat	29
Pola Hidup Merokok	31
Kesehatan Bayi	32
Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	34
BAB 4 KONDISI KETENAGAKERJAAN	39
Angkatan Kerja sebagai Modal Pembangunan	41
Lapangan Usaha Pertanian Mendominasi Penyerapan Tenaga Kerja	44
Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan	45
Peranan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penciptaan Lapangan Kerja	48
BAB 5 POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA	49
Pola Konsumsi Sudah Bergeser	51
Tingkat Kecukupan Gizi	53

BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	57
Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal	60
Fasilitas Rumah Tinggal	64
BAB 7 POTRET KEMISKINAN	69
Perkembangan Penduduk Miskin	71
Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	73
BAB 8 INDIKATOR SOSIAL LAINNYA	75
Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Menjadi Kebutuhan	
Primer	77
Daftar Pustaka	81

<https://bangkepkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah dan Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	6
Tabel 1.2.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Umur di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	6
Tabel 2.1.	Jumlah Sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018-2020	24
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan yang Pernah Melakukan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	34
Tabel 3.2.	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	36
Tabel 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	65
Tabel 7.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018 –2020 ...	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2010-2020	4
Gambar 1.2.	Komposisi Penduduk Menurut Jenis Umur di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	7
Gambar 1.3.	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	9
Gambar 2.1.	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan 2018-2020 (Tahun)	15
Gambar 2.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	17
Gambar 2.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	19
Gambar 2.4.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	20
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Tertentu di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	22
Gambar 2.6.	Rasio Murid terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018-2020	25
Gambar 3.1.	Persentase Penduduk Menurut Apakah Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018-2020	30
Gambar 3.2.	Jumlah Fasilitas Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	35
Gambar 3.3.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	37
Gambar 4.1.	Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020 (Agustus).....	43

Gambar 4.2.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020 (Periode Agustus).....	45
Gambar 4.3.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020 (Periode Agustus).....	46
Gambar 4.4.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020 (Periode Agustus).....	47
Gambar 5.1.	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	52
Gambar 5.2.	Rata – Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018 - 2020	53
Gambar 5.3.	Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita per Hari Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	55
Gambar 5.4.	Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) per Kapita per Hari Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	56
Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah per Kapita di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020.....	61
Gambar 6.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	63
Gambar 6.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	63
Gambar 6.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	64
Gambar 6.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020.....	66
Gambar 6.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	68
Gambar 7.1.	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan, Maret 2018-2020	72
Gambar 8.1.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Beberapa Akses Terhadap TIK di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020	79

KARAKTERISTIK PENDUDUK

1

KARAKTERISTIK PENDUDUK

Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini adalah penduduk, memegang peranan penting dalam proses pembangunan suatu wilayah negara. Selain sebagai pelaku dalam pembangunan, penduduk juga sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Oleh sebab itu, penataan dan pengembangan yang berkaitan erat dengan penduduk harus direncanakan dengan matang.

Dalam proses perencanaan pembangunan, data dan informasi kependudukan menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Perkembangan penduduk perlu dicermati, baik dari sisi jumlah maupun karakteristik lainnya, seperti komposisi dan distribusinya. Data yang dapat dimanfaatkan tidak hanya kondisi saat ini, akan tetapi kondisi masa lampau dan proyeksi masa yang akan datang juga sangat diperlukan sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Data kependudukan sangat dibutuhkan hampir di semua rencana program pembangunan. Setiap kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sangat mempertimbangkan karakteristik masyarakat itu sendiri.

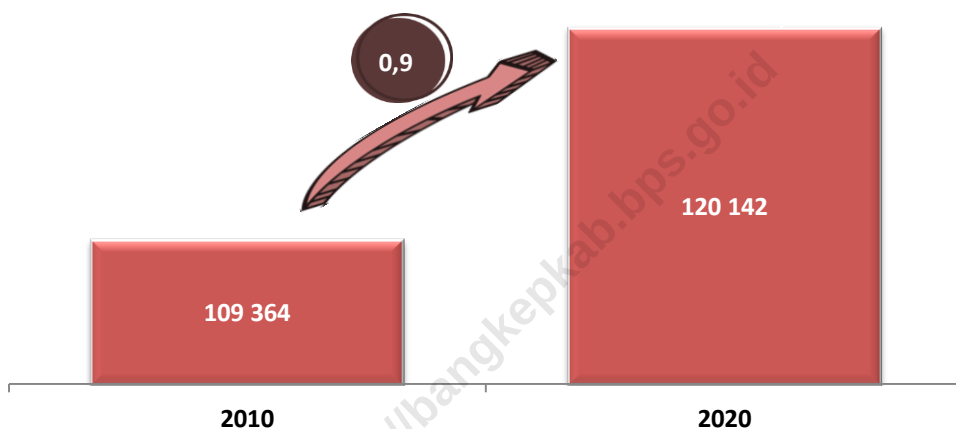
Perkembangan Penduduk

Isu kependudukan dewasa ini berkaitan dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk. Penduduk merupakan modal besar yang dimiliki suatu daerah, namun di sisi lain juga dapat menjadi masalah bagi daerah tersebut. Hal ini terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 sebanyak 120.142 jiwa. Ditinjau dari

kenaikannya, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 10.778 jiwa dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurun waktu 2010 – 2020 sebesar 0,9 persen (Gambar 1.1.).

Gambar 1.1.
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2010-2020



Sumber: Sensus Penduduk

Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi secara umum. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk yang akan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Program KB dirancang untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil yang bahagia sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 48 jiwa per km². Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk di suatu wilayah. Ditinjau di masing-masing daerah di

Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antar kabupaten/kota. Kepadatan penduduk terpusat di daerah perkotaan yang memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau menetap di kota. Dalam hal ini, Kota Palu sebagai ibukota provinsi memiliki kepadatan yang paling tinggi, mencapai 945 jiwa per km², jauh dari angka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara kabupaten/kota lain hanya memiliki kepadatan penduduk di bawah 100, dimana kabupaten dengan kepadatan terendah yaitu Morowali Utara, hanya 12 jiwa per km².

Kepadatan penduduk yang berlebihan akan dihadapkan pada masalah-masalah sosial ekonomi, seperti masalah keterbatasan lahan pemukiman, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Masalah lapangan pekerjaan ini akan berimbas pada tingkat pengangguran yang tinggi apabila tidak dapat menampung angkatan kerja yang ada. Kondisi ini dibuktikan dengan posisi Kota Palu sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Sulawesi Tengah.

Komposisi Penduduk dan Tantangan Menghadapi Bonus Demografi

Dilihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan didominasi oleh kaum laki-laki sebanyak 60.957 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 59.185 jiwa. Rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan sebanyak 102,99 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 102 – 103 penduduk laki-laki.

Tabel 1.1.
Jumlah dan Rasio Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020

Jumlah (jiwa)	120 142
Laki-Laki (jiwa)	60 957
Perempuan (jiwa)	59 185
Rasio (persen)	102,99

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020

Komposisi penduduk menurut umur bermanfaat untuk mengetahui distribusi penduduk usia muda (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan lansia (65 tahun ke atas). Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbang oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif dapat menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro. Berbeda dengan pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbang oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk.

Tabel 1.2.
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Umur di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020

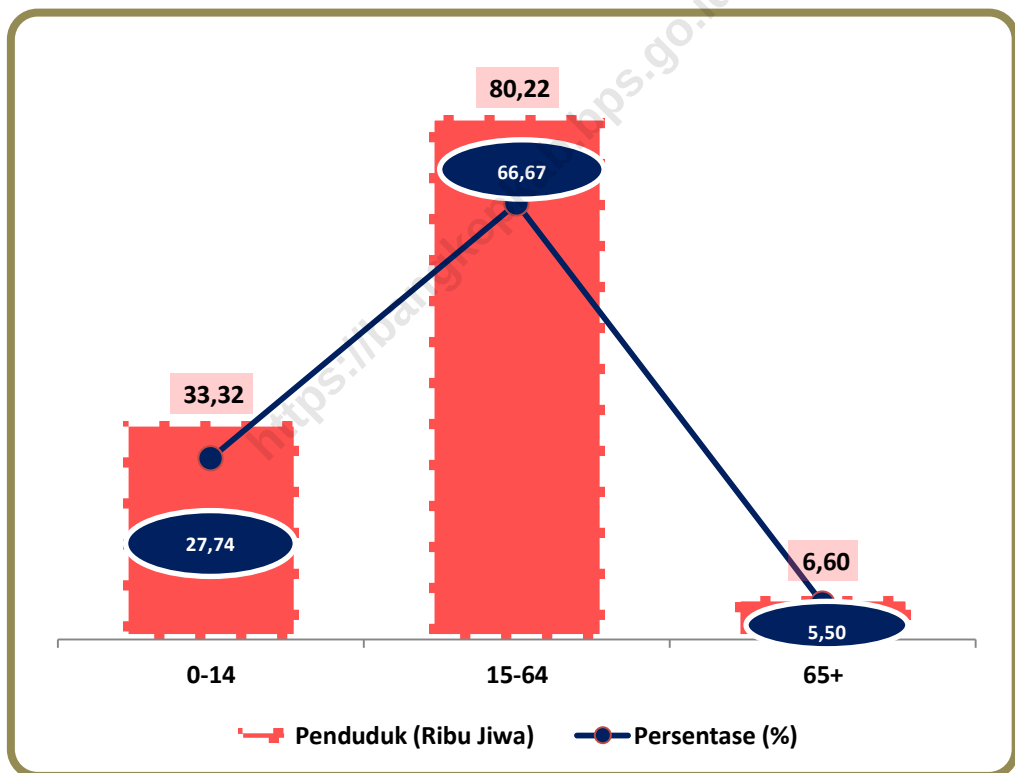
Umur	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
0 – 14 tahun	33 323	27,74
15 – 64 tahun	80 215	66,77
65+ tahun	6 604	5,50
Jumlah	120 142	100,00
Angka Beban Ketergantungan (persen)	49,77	

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh

penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin kecil menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif. Pada tahun 2020, angka beban ketergantungan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 49,77. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 1.2.
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Umur di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020

Ketika angka beban ketergantungan di suatu daerah sudah berada di bawah 50, maka terdapat indikasi bahwa daerah tersebut berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Kesempatan ini sebagai dampak positif adanya bonus demografi (*demographic deviden*), yaitu bonus yang dinikmati suatu wilayah

sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.

Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Keuntungan bonus demografi dari sisi perekonomian tentu akan membuka peluang peningkatan perekonomian melalui peningkatan pendapatan. Ilustrasinya, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak di bawah 15 tahun misalnya. Jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* (menabung) atau melakukan investasi sumber daya manusia (*human capital*) yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

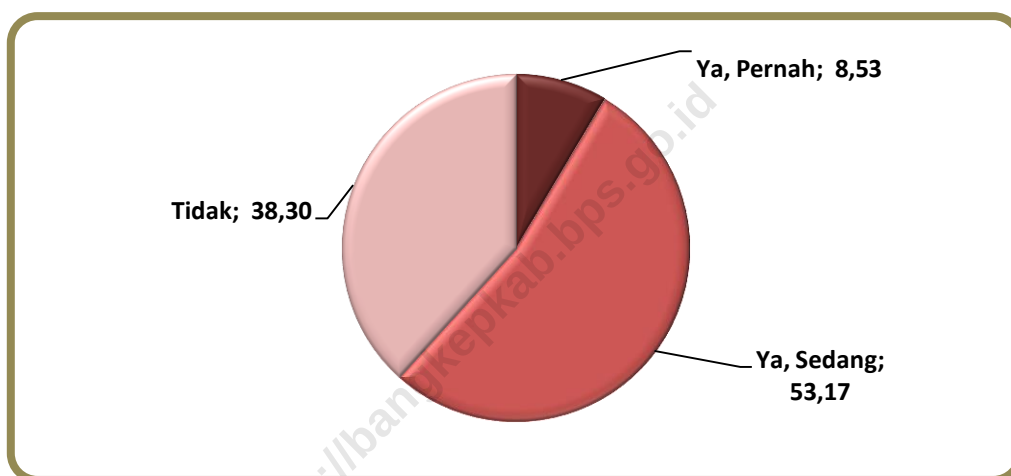
Jendela peluang (*windows of opportunity*) ini tidak boleh disia-siakan, harus disertai dengan peningkatan kesempatan lapangan kerja. Salah satunya dengan menggenjot lapangan usaha yang belum maksimal dan memacu perkembangan UMKM untuk menyerap angkatan kerja yang berlimpah.

Usia Wanita Kawin Pertama dan KB sebagai Kontrol Angka Kelahiran

Pembahasan mengenai pertumbuhan penduduk tidak lepas dari angka kelahiran. Salah satu hal yang mempengaruhi angka kelahiran yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang

memiliki berbagai macam jenisnya. Pemerintah mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk partisipasi KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi.

Gambar 1.3.
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi KB di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada tahun 2020, persentase penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin di Kabupaten Banggai Kepulauan, 53,17 persen diantaranya sedang menggunakan KB dan masih terdapat 38,30 persen yang tidak ber-KB. Dari seluruh penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan tidak ber-KB memiliki beberapa alasan sehingga tidak menggunakan alat/cara KB. Ada sebanyak 43,35 persen tidak menggunakan alat/cara KB karena alasan fertilitas. 11,59 karena takut efek samping, 7,88 persen karena tidak setuju, 1,19 persen karena tidak tahu serta 35,99 persen karena alasan lainnya. Berbagai macam alasan ini harus menjadi perhatian bersama untuk terus mensosialisasikan program KB, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan, manfaat, pencegahan efek samping, dan hal hal lain terkait KB lainnya.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu. Beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan seseorang memilih alat KB, seperti faktor keamanan, frekuensi pemakaian, efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai, dan faktor kenyamanan bagi penggunanya. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, alat/cara KB yang paling banyak digunakan yaitu alat/cara KB modern. Terdapat 16,63 persen penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dan sedang ber KB menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan 83,37 persen menggunakan non MKJP. Adapun MKJP ini meliputi Tubektomi/MOW, Vasektomi/MOP, IUD dan Susuk KB/Implan.

<https://bangkepkab.bps.go.id/>

CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN

<https://bangkepkab.bps.go.id>

2

CAPAIAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui modal sumber daya manusia. Dalam tulisan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Presiden Bank Dunia menyampaikan bahwa salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara, yaitu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan memiliki arti yang luas, baik pendidikan dalam arti formal maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas modal manusia. Peningkatan pendidikan seseorang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan yang banyak, maka semakin tinggi produktivitasnya dan berimbas pada perekonomian nasional akan tumbuh lebih tinggi. Hal yang senada juga tampak pada kajian Bank Dunia yang membandingkan selama 25 tahun bahwa 20 negara yang lebih fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia memiliki korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan tingkat pendapatan.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar melaksanakan berbagai macam program pembangunan pendidikan, salah satunya melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN. Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan anak-anak yang mampu mendapatkan proses belajar yang efektif dan unggul, sehingga bisa menyiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh kesempatan dan tantangan. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, diharapkan pembangunan nasional dapat lebih terjamin dan mampu memajukan bangsa di dunia internasional.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu misi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah pemerataan pendidikan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Di Kabupaten Banggai Kepulauan, pendidikan juga menjadi salah satu fokus pembangunan daerah yakni melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan.

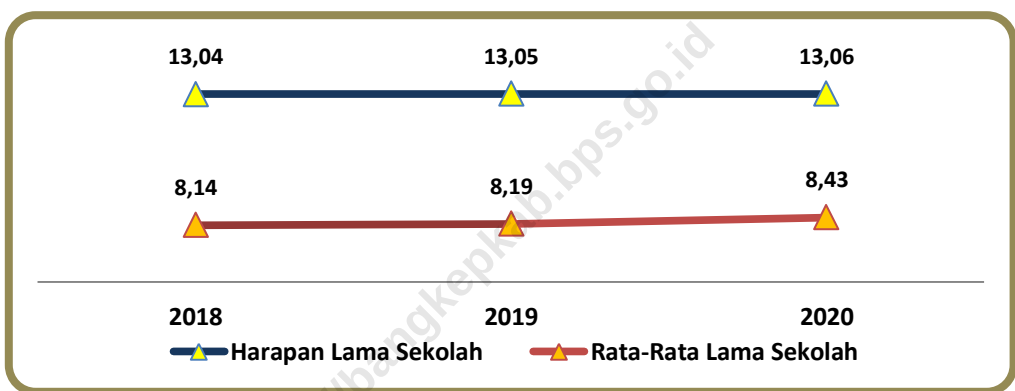
Perkembangan Capaian Pendidikan

Capaian pendidikan penduduk dapat diukur dengan banyak indikator, salah satunya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) (*expected years of schooling*) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (*mean years of schooling*). Kedua indikator ini pula yang digunakan sebagai pengukur dimensi pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencapai 13,06 tahun, setara dengan diploma tingkat I. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini terus menunjukkan kenaikan. Cepat lambatnya pertumbuhan angka ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan. Angka HLS merupakan indikator jangka pendek. Indikator ini dapat dengan mudah bergerak jika ada kebijakan baru dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, karena dipengaruhi oleh kebijakan jangka pendek maka HLS merupakan salah satu indikator proses. Jika suatu tahapan dalam pendidikan tidak berjalan semestinya, atau jika ada kebijakan yang membuka peluang partisipasi sekolah namun tidak lagi bertahan, maka

dimungkinkan terjadinya penurunan angka HLS. Satu yang harus diingat bahwa indikator pendidikan mengukur manusianya. Pendidikan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebab manusia itu kompleks. Tanpa ada kemauan dari pribadi seseorang untuk meningkatkan taraf pendidikannya, segala fasilitas, infrastruktur dan kebijakan, sebaik apapun itu, tidak akan memberikan dampak yang berarti.

Gambar 2.1.
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018-2020 (Tahun)



Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 telah mencapai 8,43 tahun, setara dengan sedang mengenyam bangku kelas VIII atau kelas 2 SMP. Sama halnya dengan HLS, RLS Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

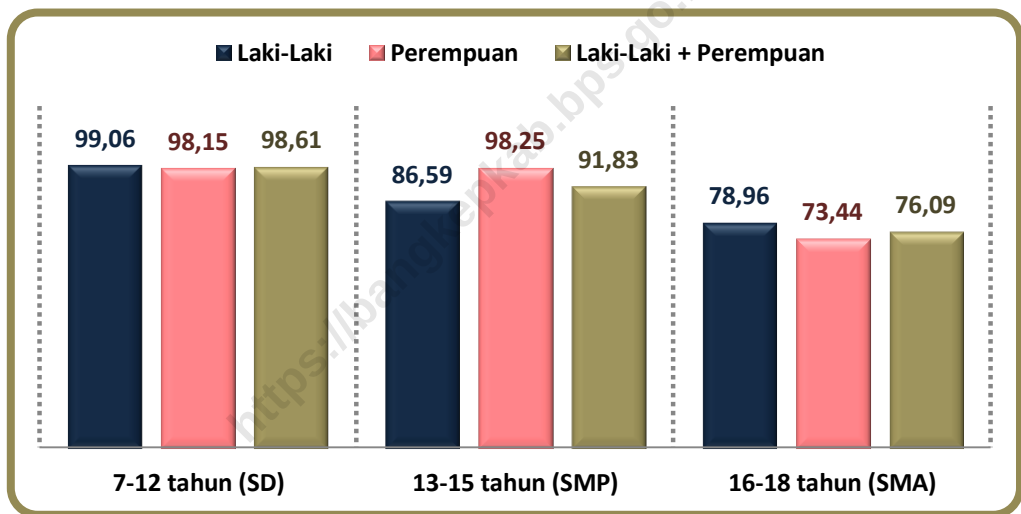
Secara umum, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari besarnya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun kualitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui, terutama pada kelompok pendidikan dasar. Upaya ini juga meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.

Pemerintah Indonesia bersama dengan dunia internasional telah berkomitmen untuk mencapai target SDGs dalam bidang pendidikan yaitu ‘menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Adapun target yang ingin dicapai yaitu menjamin semua anak di wilayah Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, sampai tahun 2030 dapat menyelesaikan SD-SMP. Dalam prosesnya, hingga tahun 2020 capaian tersebut dapat dilihat berdasarkan angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini juga merupakan salah satu indikator capaian pendidikan selain HLS dan RLS. Tingkat partisipasi sekolah mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Beberapa ukuran tingkat partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Semakin besar APS, maka akan semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah. APK menunjukkan proporsi anak

sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada usia tertentu. APK dapat bernilai di atas 100 karena terdapat penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu di luar kelompok usia yang seharusnya. Umumnya, hal ini terjadi pada jenjang pendidikan SD karena adanya anak yang belum mencukupi umur 7 (tujuh) tahun yang sudah bersekolah. Sementara itu, APM menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu.

Gambar 2.2.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

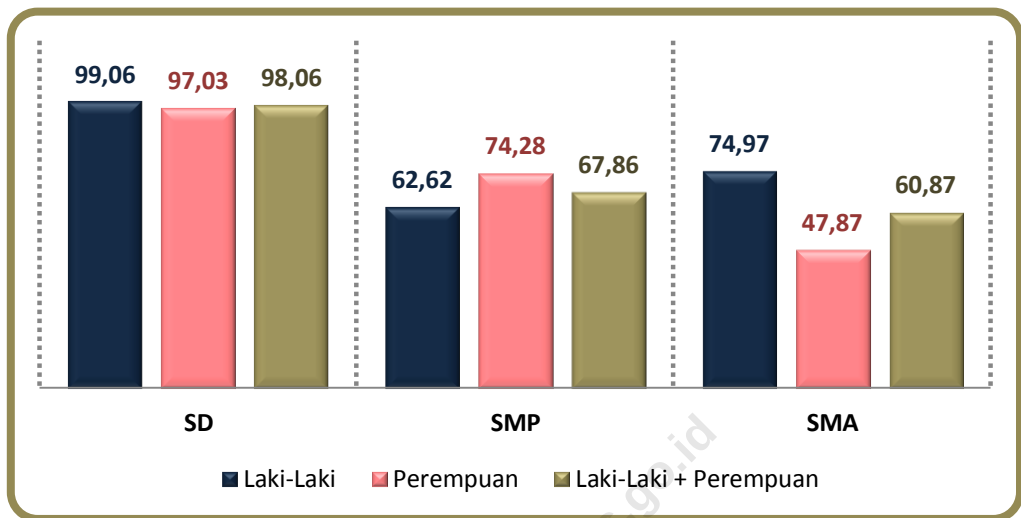
Secara umum, APS Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 sudah cukup baik, khususnya pada level pendidikan dasar dan menengah yang masing-masing mencapai 98,61 persen dan 91,83 persen. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah terus mengupayakan agar setiap warga negara dapat menikmati pendidikan dasar hingga sembilan tahun. Sementara itu, nilai APS jenjang usia 16-18 tahun masih 76,09 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan APS jenjang usia di bawahnya. Hal ini disebabkan banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu,

peningkatan APS pada jenjang usia ini masih perlu ditingkatkan. Jika diperhatikan, semakin meningkat jenjang usia, nilai APS semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini sangat sayangkan, mengingat upaya pendidikan ini ditujukan untuk mencetak SDM yang berpendidikan tinggi dan unggul agar dapat bersaing dalam skala global, termasuk untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN.

Angka APS untuk jenjang pendidikan menengah atas lebih rendah dibandingkan dengan APS jenjang usia dibawahnya. Hal ini disebabkan banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih terjun ke dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan APS pada jenjang usia ini masih perlu ditingkatkan. Jika diperhatikan, semakin meningkat jenjang usia, nilai APS semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak akan yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat upaya pendidikan ini ditujukan untuk mencetak SDM yang berpendidikan tinggi dan unggul agar dapat bersaing dalam skala global, termasuk untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN.

APS dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses pendidikan. Akan tetapi, informasi yang digambarkan oleh APS ini tidak memperhitungkan anak pada kelompok yang bersekolah pada jenjangnya. Contohnya, APS pada jenjang usia 13-15 mengabaikan anak usia 15 tahun yang sudah bersekolah SMA/ sederajat. Untuk menggambarkan partisipasi sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, maka dapat menggunakan indikator APM.

Gambar 2.3.
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020

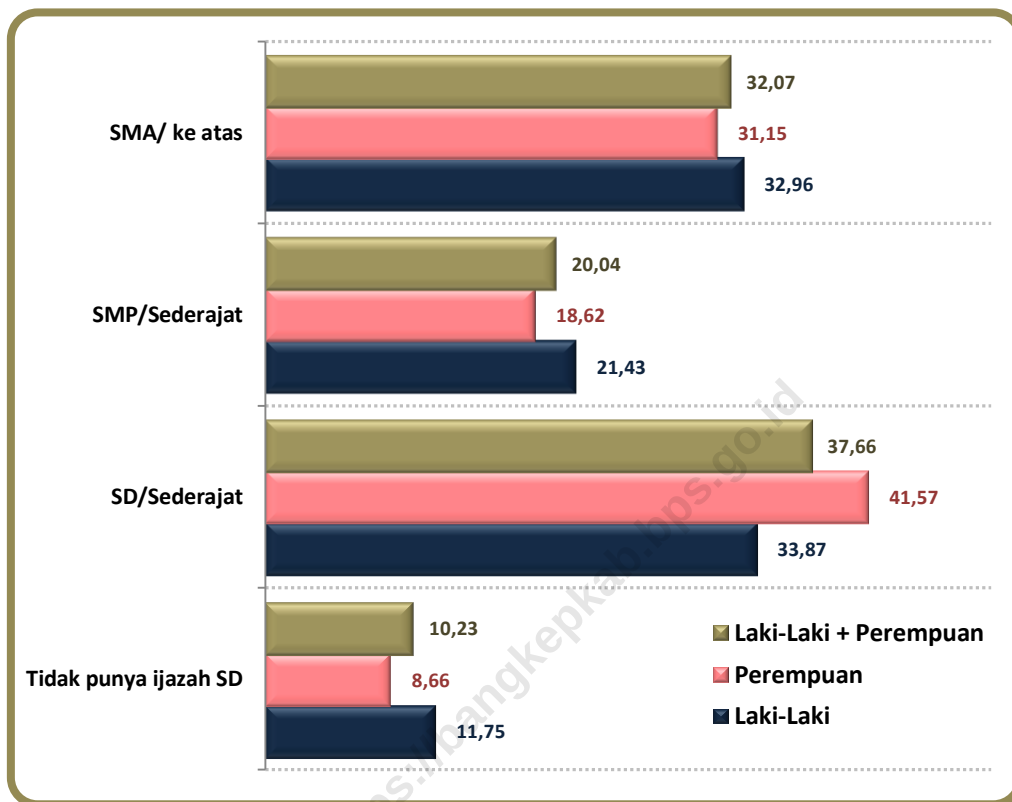


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Pola APM di Kabupaten Banggai Kepulauan hampir sama dengan dengan pola APS dimana angka tertinggi berada pada jenjang SD/Sederajat, sebesar 98,06 persen. Kemudian semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APM semakin rendah, yaitu 67,86 persen pada jenjang SMP/Sederajat dan 60,87 persen pada jenjang SMA/Sederajat. Rendahnya APM jenjang SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat menunjukkan bahwa masih banyaknya anak usia 13-15 tahun yang belum merasakan pendidikan SMP/Sederajat dan anak usia 16-18 tahun yang belum merasakan pendidikan jenjang SMA/Sederajat.

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia dinilai dapat berpengaruh terhadap produktifitas penduduk, salah satu indikatornya adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Secara normal, intelektualitas manusia berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka diasumsikan semakin luas kemampuan akses terhadap pekerjaan dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi kunci untuk menekan pengangguran yang ada. Berbekal spesifikasi keahlian, setiap penduduk akan mampu bersaing secara sehat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang sesuai dibidangnya masing-masing.

Gambar 2.4.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi
Yang Dimiliki di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

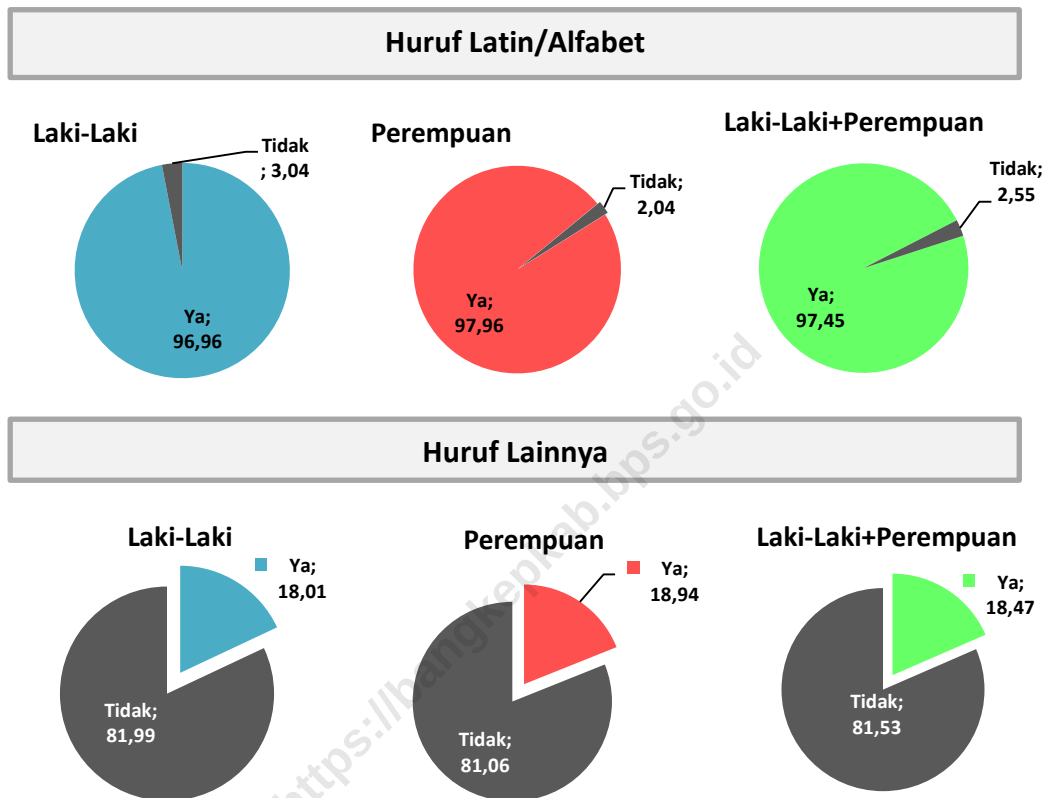
Kemampuan Membaca dan Menulis Perempuan Lebih Rendah Dibandingkan dengan Laki-laki

Membaca dan menulis merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang luas. Dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menjangkau ilmu pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa karena sebagian besar aspek kehidupan manusia membutuhkan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, kemampuan baca-tulis penduduk dewasa dapat dijadikan sebagai ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan.

Angka Melek Huruf (*literacy rate*) menjadi salah satu indikator dasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis. Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. Ukuran angka melek ini diukur pada penduduk usia 15 tahun keatas karena pada usia tersebut dianggap sebagai masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis.

Secara umum, angka melek huruf Kabupaten Banggai Kepulauan sudah tinggi. Pada tahun 2020 sebesar 97,45 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis huruf. Apabila dilihat dari kemampuan menguasai huruf latin, sebanyak 97,45 persen penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu membaca dan menulis huruf latin/alfabet. Uniknya, apabila ditelaah di setiap kemampuan menguasai huruf menurut jenis kelamin, tampak bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Seperti yang tercatat pada kemampuan membaca dan menulis huruf latin/alfabet, dan huruf lainnya dimana persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang menguasai huruf-huruf tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Secara tidak langsung hal tersebut menyiratkan bahwa kemampuan membaca dan menulis laki-laki masih lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan harapan mengingat bahwa perempuan sebagai Ibu maupun calon Ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Seorang Ibu diharapkan dapat menjadi guru yang akan mengajar dan mendidik anak. Salah satu contoh sederhana mengapa ibu harus dapat membaca dan menulis yaitu untuk mengetahui standar gizi yang seimbang bagi anak. Hal semacam itu dapat diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan melalui membaca dan menulis karena mencari tahu tentang bagaimana mendidik anak yang baik tidak hanya sekadar asal mengikuti pemikiran dan paradigma lama tentang bagaimana seharusnya mendidik anak.

Gambar 2.5.
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
Menurut Kemampuan Membaca dan Menulis Huruf Tertentu
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sarana dan Prasarana Pendidikan Ditingkatkan

Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Masalah yang masih terjadi saat ini yaitu tidak meratanya fasilitas-fasilitas tersebut sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak. Oleh karena itu, akses pendidikan berkualitas yang merata menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan.

Pada tahun 2018, jumlah sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk jenjang SD/ sederajat sebanyak 166 unit sekolah. Dengan jumlah desa/ kelurahan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 144, dapat diasumsikan bahwa rata-rata di satu desa/ kelurahan memiliki minimal satu fasilitas Sekolah Dasar. Dengan tersedianya Sekolah Dasar di setiap desa, masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi untuk sekolah dengan jarak yang relatif lebih dekat dari tempat tinggal. Sementara itu, jumlah sekolah untuk jenjang SMP/ Sederajat sebanyak 69 unit. Data tahun 2018 untuk jenjang SMA/ sederajat sebanyak 35 unit sekolah. Secara umum, jumlah sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Semakin banyaknya jumlah sekolah ini diharapkan semakin banyak menampung siswa sehingga akan meningkatkan partisipasi sekolah. Tidak hanya itu, keberadaan sekolah ini juga harus didukung oleh akses transportasi yang mudah dan murah bagi masyarakat sehingga keberadaan sekolah ini mudah dijangkau.

Tabel 2.1.
Jumlah Sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2016-2018

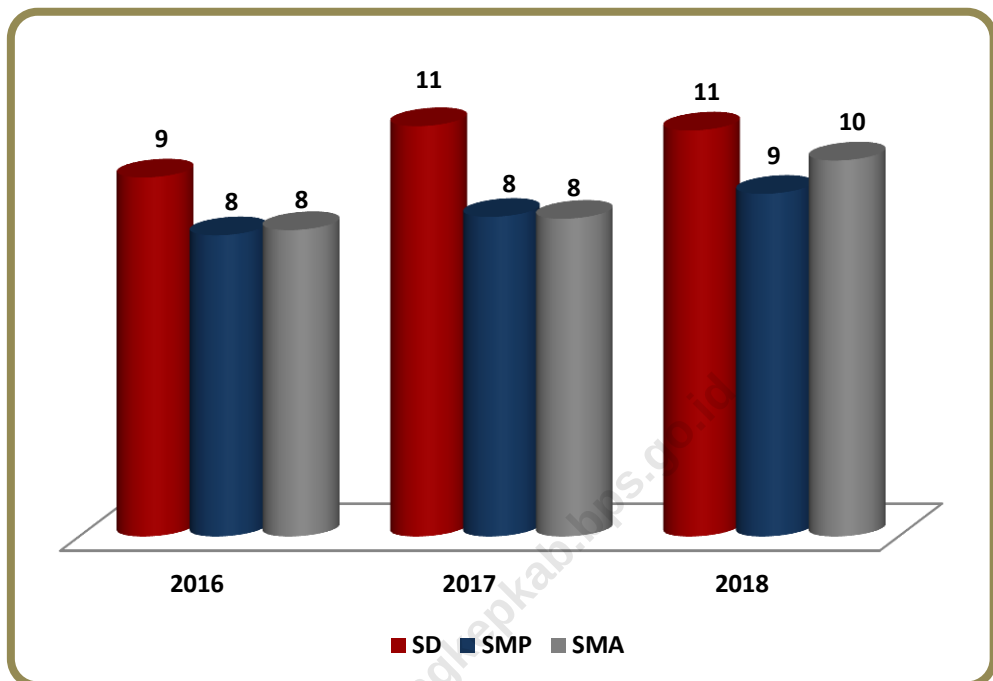
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	166	170	166
SMP/Sederajat	71	72	69
SMA/Sederajat	35	35	35

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2017-2019

Selain keberadaan sekolah, indikator lain yang menggambarkan kualitas pendidikan yang baik yaitu peranan guru dimana dalam proses pembelajaran guru sebagai pendidik memiliki peranan yang sangat krusial. Seorang guru harus mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik sehingga peserta didik mampu menyerap ilmu yang diberikan, menjadi teladan yang baik, dan mampu membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi diri. Pentingnya peranan guru menjadikan posisi guru menjadi titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan.

Rasio murid terhadap guru dapat menggambarkan kapasitas mengajar per satu guru. Secara umum, rasio murid terhadap guru di Kabupaten Banggai Kepulauan cukup baik. Pada tahun 2018, kapasitas mengajar setiap guru hanya sekitar 9-11 murid. Hal ini menunjukkan bahwa beban mengajar setiap guru tidak terlalu tinggi sehingga diharapkan terciptanya pemanfaatan guru yang lebih efisien. Namun, bukan berarti semakin kecil nilai rasionya maka akan semakin baik. Apabila nilai rasio terlalu kecil, maka akan terjadi inefisiensi pemanfaatan guru yang tersedia. Masalah guru tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, akan tetapi distribusinya juga harus diperhatikan. Selain itu, harus juga diimbangi dengan kualitas guru yang baik untuk dapat mencetak generasi penerus bangsa yang baik pula.

Gambar 2.6.
Rasio Murid terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2016-2018



Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka, 2017-2019

Catatan : *) Data untuk SMA tahun 2017 belum tersedia. Jadi diasumsikan sama dengan 2016

TANTANGAN BIDANG KESEHATAN

3

TANTANGAN BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi salah satu dimensi yang digencarkan pembangunannya oleh pemerintah. Dalam tulisan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Presiden Bank Dunia menyampaikan bahwa salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara, yaitu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia selain melalui pendidikan, juga melalui bidang kesehatan. Dalam *Human Resources Summit*, beliau menyampaikan bahwa sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan cerdas juga menjadi perhatian pemerintah saat ini. Selain mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN, pemerintah juga memberikan lima persen APBN untuk kesehatan. Diharapkan dengan besarnya anggaran tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan sehat, maka sehingga dapat turut aktif dalam pembangunan nasional.

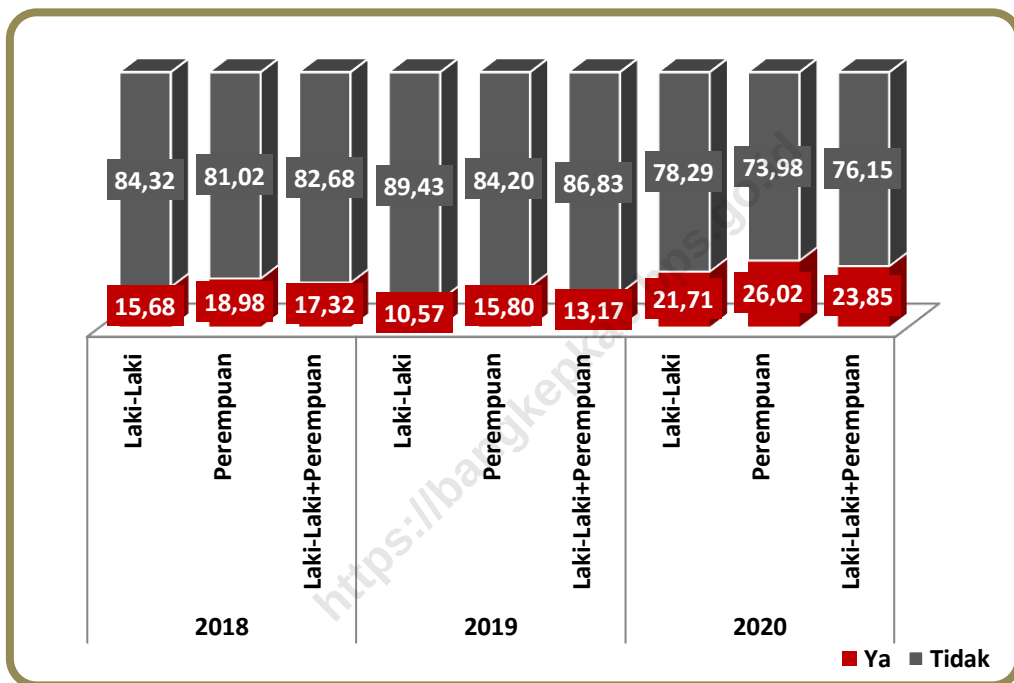
Morbiditas sebagai Gambaran Resistensi Masyarakat

Morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Morbiditas ini dapat menjadi salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk secara umum. Semakin kecil angka morbiditas berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah.

Pada tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan setidaknya terdapat 23,85 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 13,17 persen pada tahun 2019 dan 23,85 persen pada tahun 2020. Bertambahnya persentase keluhan kesehatan masyarakat di tahun 2020 terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Apabila penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ini semakin banyak, itu berarti masyarakat rentan terhadap berbagai macam penyakit yang timbul akibat melemahnya resistensi. Kondisi kesehatan yang buruk selanjutnya akan berpengaruh terhadap usia harapan hidup dan mortalitas.

Gambar 3.1.
Persentase Penduduk Menurut Apakah Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018-2020



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 - 2020

Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2018 - 2020 perempuan lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Secara tidak langsung, kondisi ini memberikan *warning* kepada perempuan untuk lebih menjaga kesehatan.

Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan pada tahun 2020, sebanyak 47,50 persen telah menggunakan jaminan kesehatan, sedangkan sisanya, 52,50 persen, tidak menggunakan jaminan kesehatan. Terkait jaminan kesehatan, pemerintah telah mengupayakan program jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Kesehatan yang diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pola Hidup Merokok

Dalam teori Blum, faktor terbesar kedua yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat setelah faktor lingkungan sekitar yaitu perilaku kesehatan. Faktor ini setidaknya menyumbang kurang lebih 30 persen dari tingkat kesehatan manusia. Salah satu contoh sederhana dari perilaku yang sehat adalah dengan tidak merokok. Namun sayangnya, merokok kini seolah menjadi suatu *trend*, terutama bagi kaum laki-laki.

Seperti yang sudah diketahui secara umum bahwa rokok mengandung banyak racun yang menyebabkan berbagai penyakit, seperti kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan, dan penyakit-penyakit lain hingga menyebabkan kematian. Tidak hanya kandungan zat dalam rokok yang berbahaya, akan tetapi asap yang ditimbulkan juga menjadi polutan bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, bahaya rokok tidak hanya mengancam penggunaannya, akan tetapi juga orang-orang di sekitarnya.

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 menunjukkan bahwa 34,95 persen penduduk berusia lima belas tahun ke atas di Kabupaten Banggai Kepulauan merokok. Mirisnya, jumlah batang rokok yang dihisap para perokok ini tidak sedikit. Pada tahun 2020 rata-rata jumlah batang rokok per minggu yang dihisap perokok di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 92 batang yang berarti rata-rata per orang merokok lebih dari 13 batang per hari. Melihat banyaknya perokok dan jumlah rokok yang dikonsumsi, tidak heran bahwa rokok

menjadi salah satu komoditas utama dalam pengeluaran rumah tangga. Padahal, biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli rokok sebenarnya dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi rumah tangga.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa bahaya rokok ini tidak hanya dirasakan oleh konsumen rokok itu sendiri, akan tetapi juga orang lain di sekitarnya. Misalkan saja dalam satu rumah tangga terdiri dari seorang ayah, ibu, dan dua orang anak. Apabila ayah merokok, maka yang bahaya yang ditimbulkan dapat berimbas pada seluruh anggota keluarganya. Dengan kata lain, satu orang yang merokok aktif, empat orang menanggung akibatnya.

Kesehatan Bayi

Persoalan kesehatan masyarakat, tidak akan lepas pada tingkat kesehatan balita. Bayi sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya dijamin gizi dan kesehatannya agar bisa tumbuh menjadi sumber daya manusia di masa depan yang berkualitas. Mencetak anak-anak menuju masa depan yang sehat dan cerdas dimulai dari pertumbuhan awal mereka sejak bayi.

Salah satu faktor penentu kesehatan bayi yaitu dari apa yang dikonsumsi. ASI menjadi makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI merupakan gizi yang sempurna bagi bayi. Menurut WHO, ASI terbukti mengandung antibodi yang dapat melindungi bayi dari diare dan pneumonia, dua penyebab utama kematian anak di dunia. Selain sebagai daya tahan tubuh bagi bayi, ASI juga dapat melindungi bayi dari gastroenteritis (peradangan perut dan usus), penyakit pernapasan, infeksi telinga, dan meningitis. Selain melindungi semasa anak-anak, ASI juga memiliki manfaat jangka panjang. Bayi yang mendapatkan ASI memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, dan penyakit radang usus ketika dewasa. Besarnya manfaat ASI bagi ibu dan anak, hingga WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam

bulan pada bayi. Setelah masa tersebut, bayi dapat diberikan makanan pendamping secara bertahap. ASI disarankan dilanjutkan hingga bayi usia menginjak dua tahun.

Kesadaran ibu untuk memberikan ASI sangat diperlukan demi generasi yang tahan terhadap penyakit ke depannya. Tentu saja dukungan seorang ayah juga tak kalah pentingnya untuk meningkatkan persentase anak yang mengkonsumsi ASI hingga usia 2 tahun.

Di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020, sudah 93,98 persen bayi usia kurang dari dua tahun telah diberi ASI. Rata-rata lama pemberian ASI yakni selama 11-12 bulan, telah melewati masa ASI eksklusif. Artinya, secara umum, sebagian besar bayi di Kabupaten Banggai Kepulauan telah memperoleh ASI eksklusif, meskipun tidak dilanjutkan hingga dua tahun.

Persoalan selanjutnya yaitu tentang pemberian imunisasi pada balita. Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementerian kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Tabel 3.1.
Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan yang Pernah Melakukan Imunisasi
Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020

Jenis Imunisasi	Persentase
(1)	(2)
BCG	87,86
DPT	86,53
Polio	90,50
Campak	68,16
Hepatitis B	86,09
Imunisasi Lengkap	46,52

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum mencapai 100 persen. Persentase penduduk berumur 0-59 bulan yang sudah diberikan imunisasi lengkap hanya sebesar 46,52 persen, artinya masih terdapat 53,48 persen penduduk usia 0-59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Hal ini sangat disayangkan mengingat imunisasi ini sangat penting mencegah berbagai macam penyakit, wabah, cacat, kematian akibat penyakit berbahaya. Rendahnya persentase balita yang mendapat imunisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya kurangnya pengetahuan para orang tua terkait imunisasi. Padahal pemerintah sudah mengupayakan fasilitas pemberian subsidi untuk kegiatan imunisasi ini.

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan juga harus diupayakan dengan mutu dan kualitas yang baik. Tidak hanya dari sisi ketersediaan,

kemudahan akses dan keterjangkauannya juga harus diupayakan agar adil dan merata.

Pada tahun 2020, jumlah rumah sakit di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 2 unit. Selain itu, ketersediaan puskesmas dan posyandu juga menjadi pendukung untuk menjangkau masyarakat di level kecamatan dan desa. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, jumlah puskesmas sebanyak 13 unit. Dengan jumlah kecamatan yang sebanyak 12 menunjukkan bahwa setidaknya dalam satu kecamatan rata-rata sudah terdapat minimal satu puskesmas. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 175 unit dan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 144, berarti setidaknya rata-rata terdapat minimal satu posyandu di masing-masing desa/kelurahan. Di Kabupaten Banggai Kepulauan juga terdapat 36 unit polindes.

Gambar 3.2.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020

Rumah Sakit	2
Puskesmas	13
Posyandu	175
Puskesmas Pembantu	44

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2021

Untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan, selain ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu dan poskesdes, juga diperlukan tenaga medis yang memadai. Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 jumlah tenaga kebidanan sebanyak 303 orang, tenaga keperawatan 355 orang, tenaga kefarmasian 43 orang. Selanjutnya, jumlah dokter spesialis sebanyak 8 orang, dokter umum 34 orang, dan dokter gigi 6 orang. Secara total, jumlah tenaga

medis ini mengalami penambahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah tenaga medis ini diharapkan terus dilakukan mengingat jumlahnya yang masih belum terpenuhi dengan cukup, begitu pula dengan fasilitas kesehatannya.

Tabel 3.2.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020

Tenaga Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)
Tenaga Kebidanan	303
Tenaga Keperawatan	355
Tenaga Kefarmasian	43
Dokter Umum	34
Dokter Spesialis	8
Dokter Gigi	6

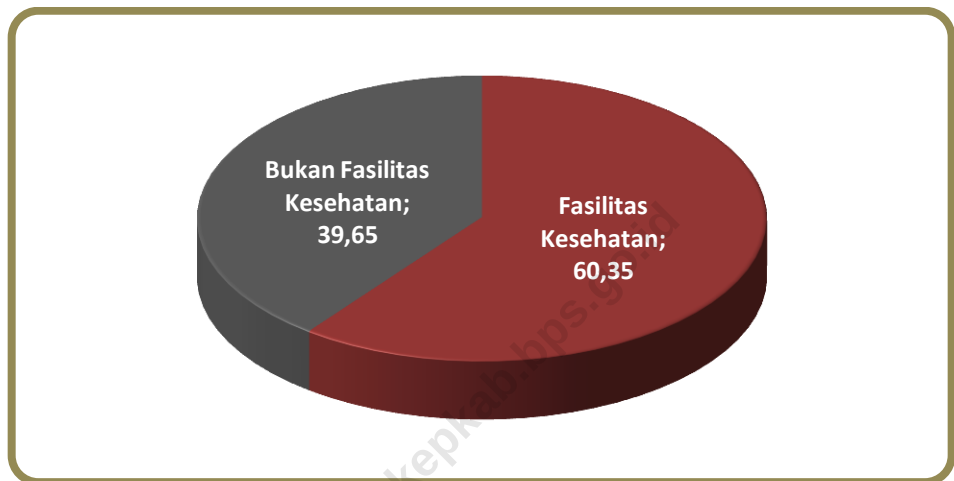
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 2020

Apabila dihitung rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang memadai. Salah satu contohnya, dengan jumlah dokter umum yang hanya 34 orang, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 120.142 jiwa, berarti 1 (satu) dokter terbebani sekitar 3.533 penduduk. Beban ini masih terlalu besar sehingga jumlah dokter masih perlu ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu, jumlah penduduk juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan tenaga kesehatan juga akan terus meningkat.

Pada tahun 2020, sebanyak 60,35 persen perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan memanfaatkan fasilitas kesehatan sebagai tempat

melahirkan. Sedangkan sisanya belum memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada dengan berbagai alasan masing-masing.

Gambar 3.3.
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

KONDISI KETENAGAKERJAAN

4

KONDISI KETENAGAKERJAAN

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi sangat berperan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kesempatan kerja dapat menjadi salah satu akar indikator adanya proses pembangunan ekonomi. Saat ini, ketenagakerjaan masih menjadi problem nasional yang tak kunjung selesai. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pembukaan kesempatan kerja baru, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar persoalan tersebut tidak meluas dan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi terkait ketenagakerjaan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini baik untuk penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, pemanfaatan data ketenagakerjaan ini juga sangat berpotensi untuk pembangunan nasional.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha.

Angkatan Kerja sebagai Modal Pembangunan

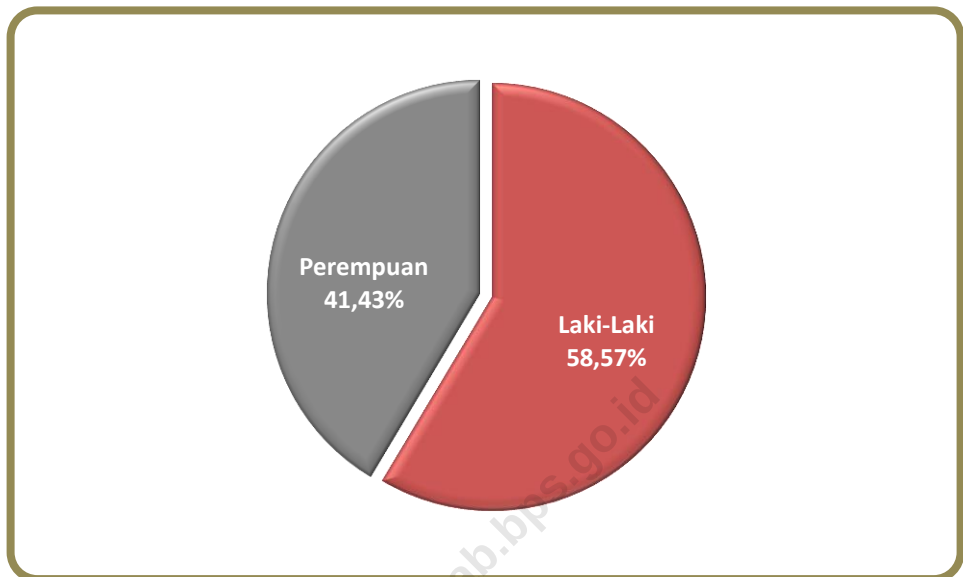
Sumber daya manusia yang produktif dapat diartikan sebagai penduduk usia kerja yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Adapun batas bawah usia kerja (*economically active population*) yaitu 15 tahun. Dalam

konsep ketenagakerjaan, penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, bukan angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan lainnya).

Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 63.278 jiwa (periode Agustus). Angkatan kerja tersebut dapat menjadi modal pembangunan bagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Jumlah angkatan kerja ini harus benar-benar diserap dalam kegiatan ekonomi dengan baik agar mendorong perekonomian di Kabupaten Banggai Kepulauan. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus didukung tersedianya lapangan kerja yang memadai. Jika tidak dapat ditampung dengan baik, besarnya angkatan kerja ini justru akan membawa dampak sosial bagi pembangunan. Tingginya beban demografi dan angka pengangguran justru akan berdampak buruk bagi perekonomian, sosial, dan politik.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan didominasi oleh laki-laki, sebanyak 37.064 jiwa atau sekitar 58,57 persen dari total angkatan kerja yang ada tahun 2020. Sebaliknya, jumlah penduduk usia kerja yang bukan merupakan angkatan kerja didominasi oleh perempuan, sekitar 73,89 persen dari total penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja. Rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja antara lain dipengaruhi faktor budaya dimana peran perempuan masih dituntut untuk mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki bertugas untuk mencari nafkah. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga sebanyak 87,03 persen diantaranya merupakan perempuan.

Gambar 4.1
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020 (Agustus)



Sumber: Banggai Kepulauan Dalam Angka 2021

Partisipasi angkatan kerja yang diukur dengan TPAK berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Semakin tinggi angka TPAK menandakan bahwa ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin banyak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang penting untuk digunakan sebagai bahan analisis dan ukuran capaian hasil pembangunan.

Angka TPAK Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 sebesar 72,97 persen (periode Agustus). Artinya, sebesar 72,97 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sisanya, 27,03 persen bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu wilayah semakin meningkat.

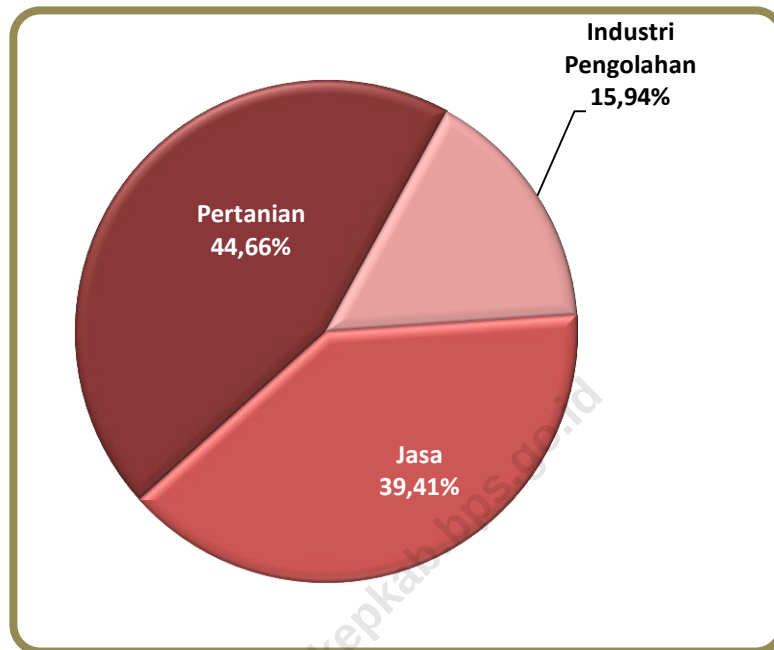
Dari seluruh angkatan kerja yang tersedia, tidak semua terserap di lapangan pekerjaan. Selain analisis angkatan kerja, dalam bidang ketenagakerjaan juga

dikenal indikator pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 sebesar 2,47 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.560 jiwa.

Lapangan Usaha Pertanian Mendominasi Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebar di seluruh jenis lapangan usaha yang ada. Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan terserap pada lapangan usaha pertanian, yaitu sekitar 27 ribu jiwa atau 44,66 persen dari total penduduk yang bekerja pada tahun 2020 (periode Agustus). Kondisi ini sejalan dengan potret perekonomian di Kabupaten Banggai Kepulauan yang memang didominasi oleh lapangan usaha pertanian. Lapangan usaha pertanian ini memiliki kontribusi sekitar 47,81 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari sini tampak bahwa sebagai lapangan usaha yang mendominasi dalam perekonomian, pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Hal tersebut karena lapangan usaha pertanian ini merupakan lapangan usaha yang padat karya sehingga penyerapan tenaga kerjanya sangat baik.

Gambar 4.2.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020 (Periode Agustus)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2020

Potret Ketenagakerjaan Menurut Pendidikan

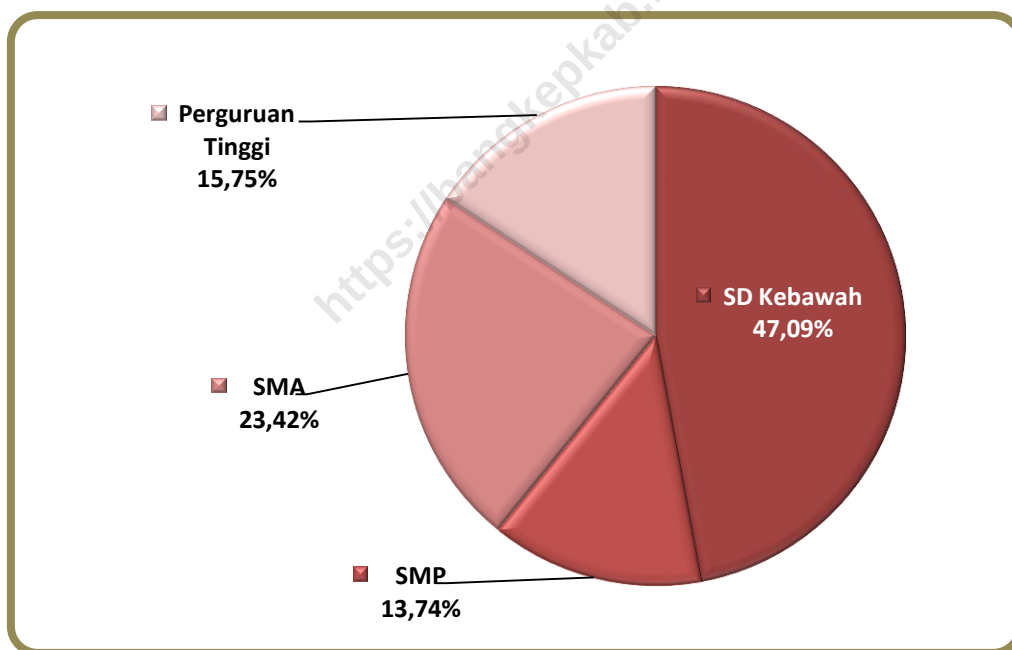
Perkembangan ketenagakerjaan tidak hanya terfokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja, akan tetapi juga harus didukung dengan kualitas yang mumpuni. Kualitas SDM yang baik akan menjadi modal bagi Kabupaten Banggai Kepulauan untuk bersaing baik di level nasional maupun internasional. Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing untuk memasuki pasar tenaga kerja global.

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini masih perlu ditingkatkan kembali. Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan lulusan Sekolah Dasar atau lebih rendah. Dilihat dari persentasenya, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, 47,09 persen diantaranya lulusan SD ke bawah. Persentase lulusan terbesar kedua yaitu SMA sebesar 23,42

persen. Tenaga kerja yang hanya lulusan SD ke bawah berkonsekuensi akan lebih banyak terserap pada kegiatan yang padat karya.

Kembali pada pembahasan tentang penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan terserap pada lapangan usaha pertanian. Secara tidak langsung, komposisi tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan lapangan usaha ini menggambarkan bahwa potret tenaga kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan masih didominasi oleh tenaga kerja pertanian dan tingkat pendidikan yang rendah.

Gambar 4.3.
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020 (Periode Agustus)

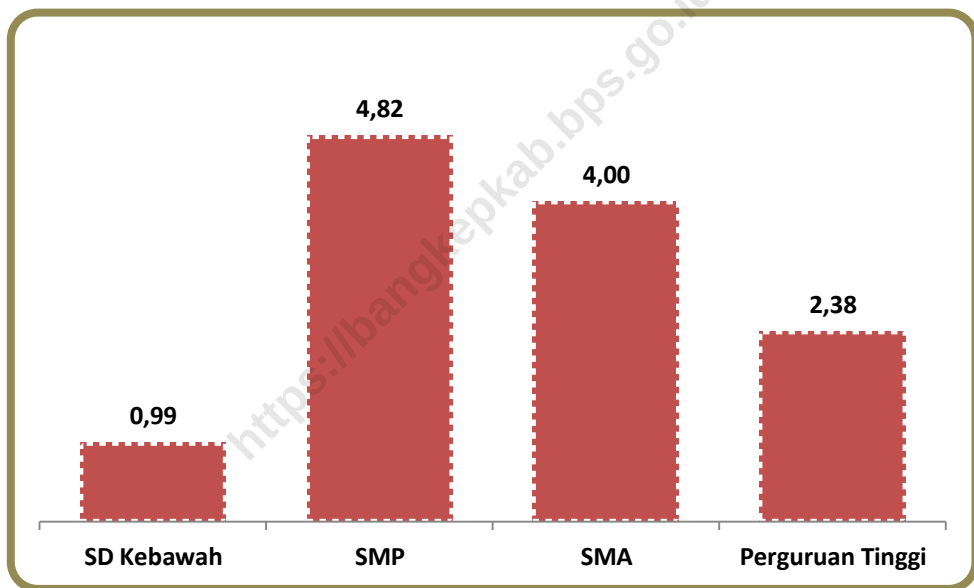


Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2020

Lebih lanjut, TPT menurut tingkat pendidikan justru menunjukkan pola yang berbeda. Tingkat pendidikan SMP memiliki angka TPT tertinggi yaitu sebesar 4,82 persen dan tingkat SMA sebesar 4,00 persen. Sebaliknya, TPT untuk tingkat pendidikan SD atau lebih rendah justru menempati posisi terendah yaitu 0,99

persen. Semakin besarnya angka TPT di tingkat pendidikan yang lebih tinggi disebabkan semakin tinggi pendidikan seseorang, kecenderungan akan menjadi lebih pemilih dalam menerima pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau kualifikasi mereka. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, terutama lulusan SD ke bawah, mereka akan cenderung lebih banyak menerima semua jenis pekerjaan, sehingga lebih banyak terserap dalam dunia usaha, terutama untuk pekerjaan yang padat karya.

Gambar 4.4.
TPT Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020
(Periode Agustus)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2020

Fakta bahwa lulusan SMA justru menunjukkan angka TPT yang tinggi ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dunia usaha dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia. Pemerintah, terutama dunia pendidikan harus lebih banyak menciptakan calon sumber daya manusia dengan keterampilan yang memang banyak dibutuhkan di dunia usaha. Dengan adanya kesesuaian antara keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan akan menciptakan tenaga kerja yang profesional di bidangnya.

Peranan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penciptaan Lapangan Kerja

Berbicara tentang ketenagakerjaan di suatu daerah tidak lepas dari keterkaitannya dengan perekonomian di daerah tersebut. Seperti yang diketahui, tenaga kerja merupakan salah satu modal dalam perekonomian dimana asumsinya semakin besar modal maka nilai tambah yang dihasilkan pun akan semakin besar yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara langsung, hubungan tersebut menggambarkan bahwa perekonomian yang tinggi diharapkan menyerap banyak tenaga kerja.

Besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin di wilayah ini. Upaya-upaya untuk menyerap lapangan pekerjaan ini harus terus digalakkan. Penduduk usia produktif ini harus dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian agar tidak menjadi beban pembangunan. Salah upaya yaitu dengan menggerakkan lapangan usaha yang padat karya seperti UMKM. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, diketahui bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Rumah Tangga (URT) di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 99,81 persen dari total jumlah usaha yang ada. Namun, UMK dan URT ini masih memiliki andil yang minim terhadap perekonomian. Oleh karena itu, dengan adanya pengembangan UMK dan URT ini diharapkan selain membantu menopang perekonomian juga dapat membantu menyerap lapangan pekerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA

5

POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA

Pola konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya. Keduanya akan membentuk pola kebiasaan tertentu dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada suatu kelompok masyarakat. Pola konsumsi masyarakat dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan melalui besaran nilai rupiah yang dibelanjakan. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dapat menunjukkan tingkat kemampuan daya beli yang selanjutnya akan tergambarkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi tingkat daya beli masyarakat maka akan semakin tinggi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari hari yang menunjukkan semakin sejahtera masyarakat tersebut.

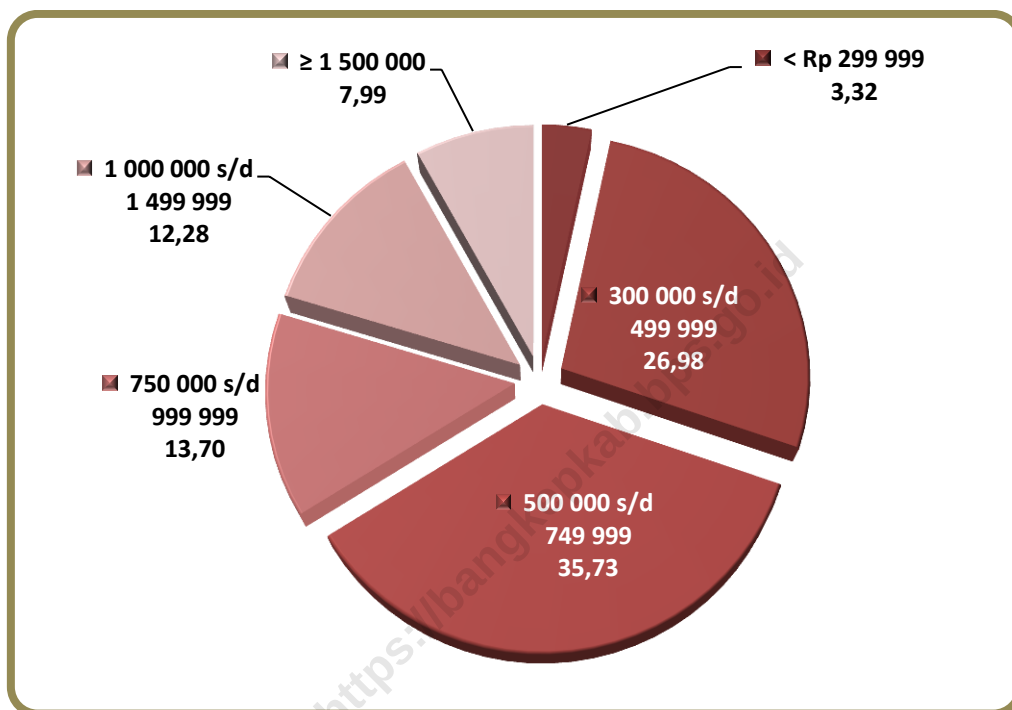
Pengeluaran rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut cenderung berpenghasilan rendah. Sebaliknya, semakin tinggi penghasilan rumah tangga, maka akan semakin kecil kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pola Konsumsi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran perkapita penduduk

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar berada pada kelompok pengeluaran perkapita sebulan Rp 500.000,00 – Rp 749.999,00.

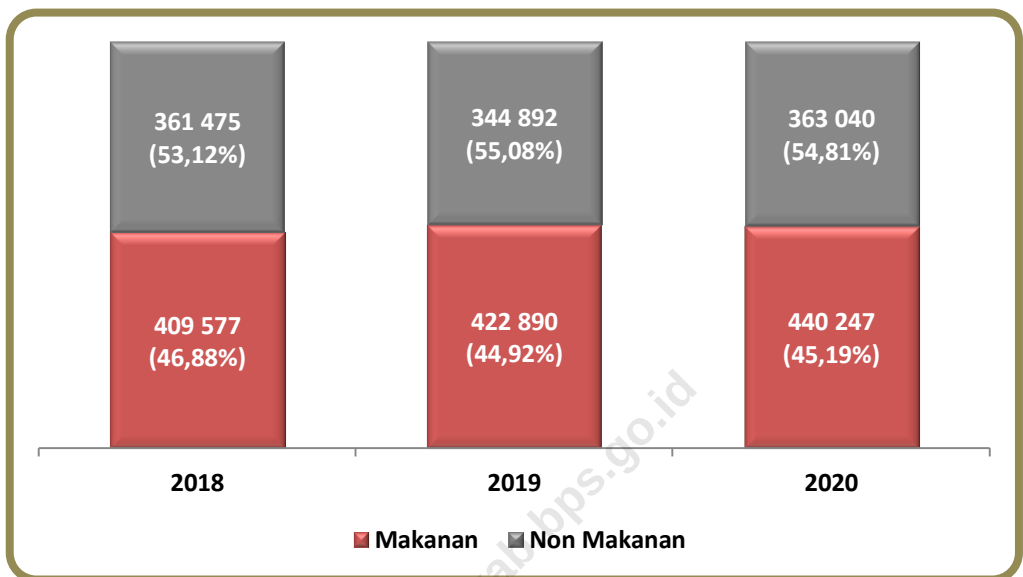
Gambar 5.1.
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Selanjutnya, apabila dibedah menurut jenis pengeluaran, maka akan tampak tidak adanya pergeseran dominasi makanan ke non makanan sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, pengeluaran perkapita sebulan didominasi oleh kelompok makanan yakni sebesar Rp409.577 atau sekitar 53,12 persen dari total pengeluaran. Sementara sisanya, 46,88 persen atau setara dengan Rp361.475 merupakan pengeluaran non makanan. Selanjutnya, pada tahun 2019 persentase pengeluaran dari total pengeluaran perkapita sebulan yang senilai Rp767.782, sebesar 55,08 persen telah digunakan untuk membeli kebutuhan makanan. Begitu pun pada tahun 2020, dari total pengeluaran perkapita sebulan yang senilai Rp803.287, sebesar 54,81 persen telah digunakan untuk membeli kebutuhan makanan.

Gambar 5.2.
Rata – Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Banggai Kepulauan,
2018 - 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 - 2020

Tingkat Kecukupan Gizi

Tujuan kedua dalam pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian yang berkelanjutan. Ini menjadi bukti adanya perhatian di mata dunia terkait peningkatan gizi masyarakat. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju hidup yang sehat.

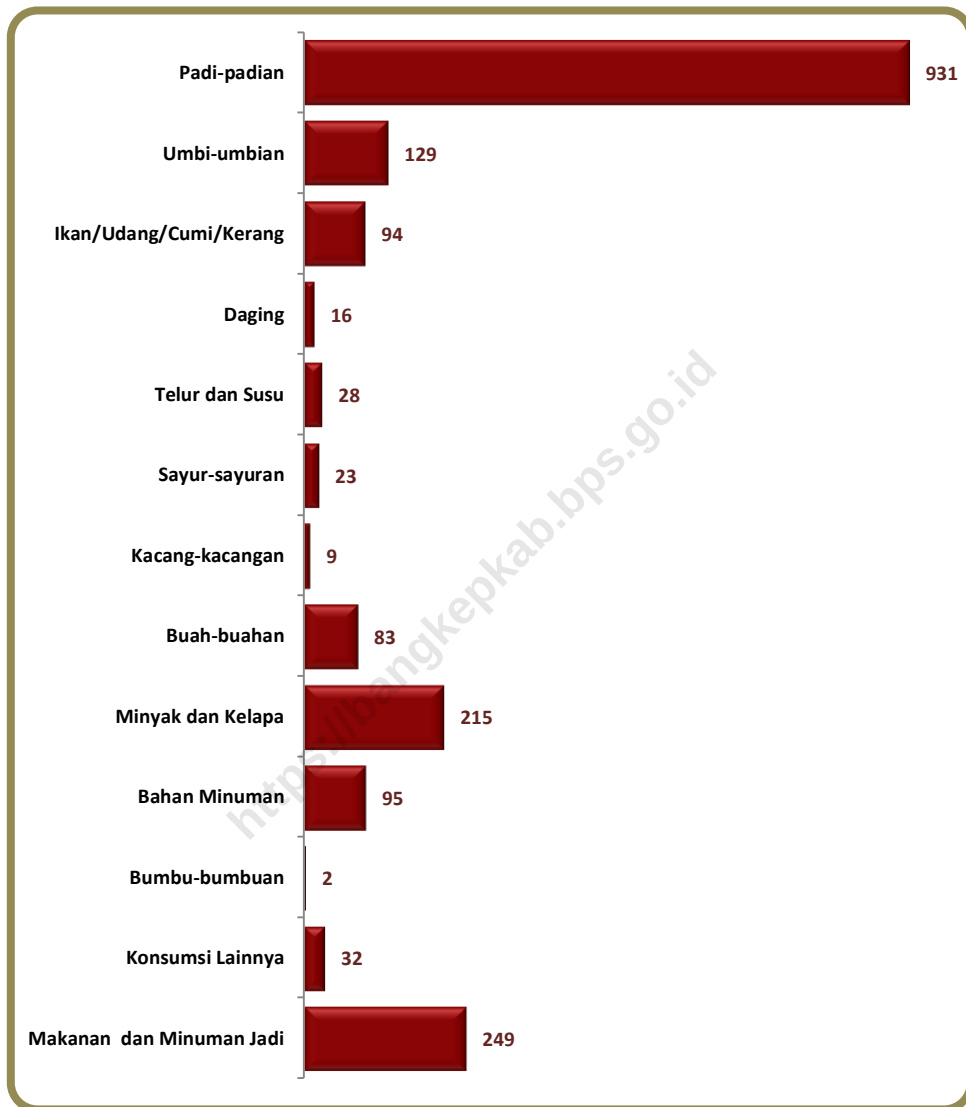
Sejalan dengan kesepakatan dunia yang tertuang dalam SDGs tersebut, agenda pembangunan pemerintah yang tertuang dalam Nawacita juga menjadikan peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat sebagai prioritas pembangunan. Status kesehatan dan gizi sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Disadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan juga akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan negara.

Untuk mencapai status kesehatan dan gizi yang baik, makanan yang dikonsumsi harus dalam jumlah yang cukup, bermutu, dan beragam agar dapat memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu, dan keragaman makanan yang dikonsumsi suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh tingkat perekonomian rumah tangga. Semakin baik kondisi perekonomian suatu rumah tangga, daya beli akan semakin tinggi, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan baik dari sisi jumlah, mutu, maupun keragamannya akan semakin baik. Dari sini tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tergambarkan melalui makanan yang dikonsumsi.

Makanan mengandung banyak zat gizi seperti kalori, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan lemak. Diantaranya, kalori dan protein menjadi indikator kecukupan gizi yang penting. Penggunaannya dalam tubuh, kalori sebagai sumber energi yang dianalogikan seperti bahan bakar. Asupan kalori yang tidak tepat akan mempengaruhi kesehatan. Kekurangan kalori akan menjadikan tubuh lemah dan menurunkan daya tahan tubuh. Kalori yang berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan, salah satunya menyebabkan obesitas. Begitu pula dengan protein yang berperan dalam mengembangkan dan memperbaiki jaringan pada tubuh. Kekurangan protein dapat membawa penyakit busung lapar dan marasmus yang dapat mengakibatkan kematian. Sebaliknya, konsumsi protein yang berlebihan akan mengganggu kinerja ginjal.

Status gizi diukur berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Standar kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 75 Tahun 2013 yang berbunyi, "Rata-Rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi".

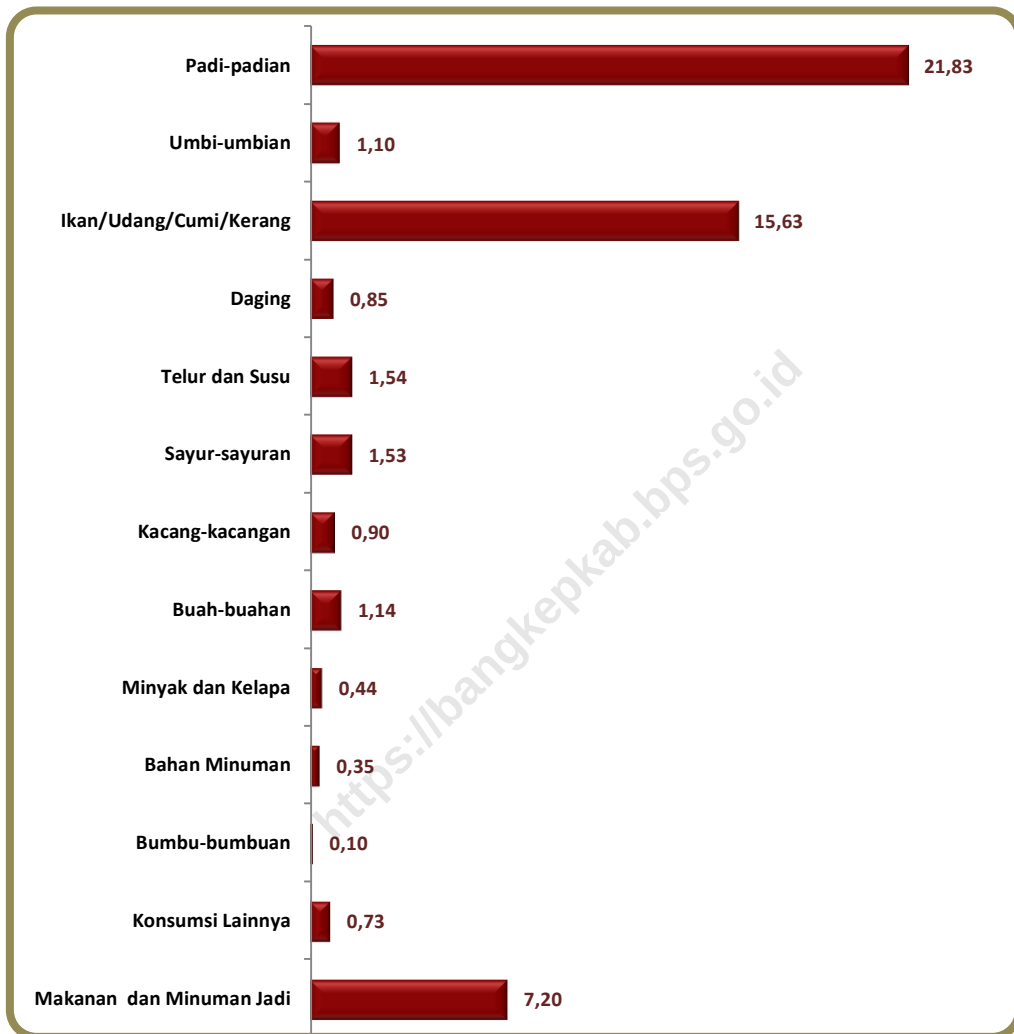
Gambar 5.3.
Rata-Rata Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita per Hari Menurut
Kelompok Barang
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, konsumsi kalori per kapita per hari di Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan pada Gambar 5.3. Adapun konsumsi protein per kapita per hari disajikan pada Gambar 5.4.

Gambar 5.4.
Rata-Rata Konsumsi Protein (Gram) per Kapita per Hari Menurut
Kelompok Barang
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

<https://bangkepkab.bekas.go.id>

6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang (pakaian) dan pangan (makanan). Rumah tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dimiliki manusia sebagai tempat untuk berlindung. Lebih luas, pemanfaatan rumah sebagai tempat tinggal tidak hanya sekedar tempat berlindung, akan tetapi harus memenuhi standar kelayakan agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam rumah tangga, rumah juga menjadi tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga. Interaksi sosial pertama seseorang yaitu dalam keluarga sehingga proses pendidikan anak juga dimulai di dalam rumah. Oleh karena itu, rumah yang layak juga menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak menjadi generasi yang berkualitas. Pentingnya kelayakan rumah tinggal ini dapat terlihat dari perhatian dunia melalui salah satu tujuan dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan atau yang sering disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui tujuannya yang kesebelas yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, rumah juga menjadi salah satu indikator status sosial seseorang. Semakin tinggi tingkat sosial seseorang, semakin lengkap fasilitas rumah yang dimiliki dan juga menunjukkan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Logikanya, semakin sejahtera suatu rumah tangga maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain makanan akan semakin tinggi, sehingga kemampuan untuk memperbaiki fasilitas rumah juga semakin tinggi.

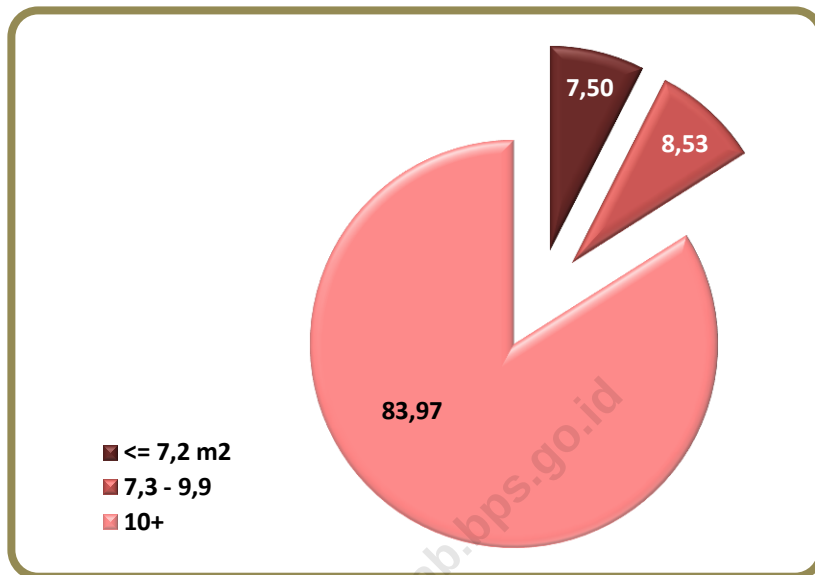
Kepemilikan dan Kualitas Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah ini merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Dengan menguasai rumah milik sendiri, diharapkan suatu rumah tangga lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan yang lain karena kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang telah mampu dipenuhi. Selain itu, dari sisi psikologis, status penguasaan rumah milik sendiri akan memberikan ketenangan bagi penghuninya dibandingkan dengan menempati rumah sewa atau bebas sewa.

Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil Susenas 2020, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 89,55 persen, sisanya 10,45 persen adalah bukan milik sendiri (termasuk rumah lainnya yakni rumah dinas, rumah adat, dan sebagainya).

Terkait kualitas, kelayakan rumah tempat tinggal perlu dilihat dari komponen material pembentuknya seperti luas lantai hunian, jenis atap, lantai dan dinding. Setiap komponen pembentuk rumah turut mempengaruhi keamanan, kenyamanan, dan kesehatan penghuninya. Rumah tinggal yang dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal tersebut.

Gambar 6.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Rumah per Kapita
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Dari sisi luas lantai, sebesar 83,97 persen rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan telah menghuni rumah dengan luas lantai per kapita $> 10 \text{ m}^2$, sebesar 8,53 persen dengan luas lantai per kapita $7,3 - 9,9 \text{ m}^2$ dan hanya 7,50 persen dengan luas lantai per kapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$. Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga sehingga tingkat kelayakan tidak cukup dilihat dengan luas rumah dalam sebuah rumah tangga. Namun, penting untuk melihat jumlah anggota rumah tangga yang menghuni rumah tersebut. Oleh karena itu kelayakan rumah lebih mudah diukur dengan luas hunian per kapita.

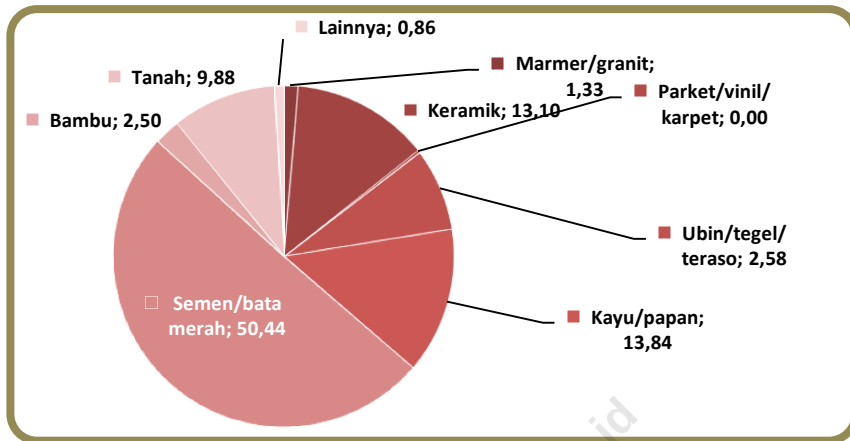
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m^2 . Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta

ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2017).

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Jenis lantai rumah tempat tinggal dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Lantai rumah yang baik adalah lantai rumah yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Jenis lantai yang memenuhi kriteria tersebut yaitu lantai yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah. Lantai tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria lantai yang sehat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacingan dan penyakit kulit.

Selain itu, jenis lantai ini juga digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Melalui jenis lantai, kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat dari tingkat kualitas perumahan yang dimiliki rumah tangga tersebut. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer diasumsikan mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumah tangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin, atau tanah. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, mayoritas rumah tangga menghuni rumah dengan lantai terluas semen/ bata merah, sebanyak 50,44 persen.

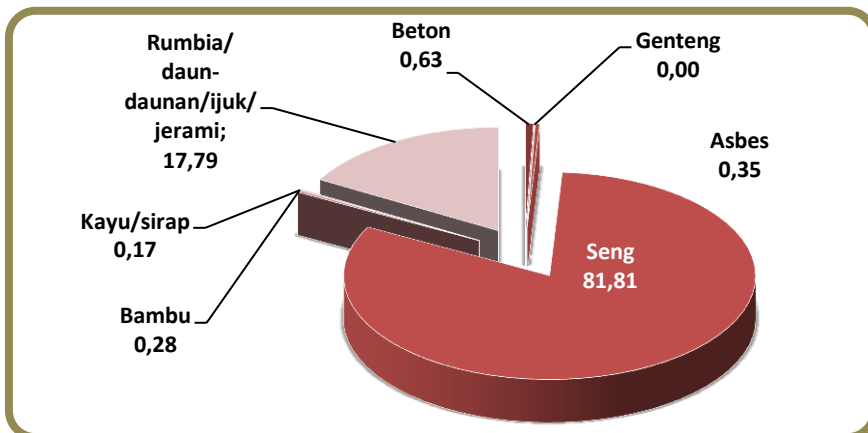
Gambar 6.2.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Rumah
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Selain dari komponen lantai, kualitas rumah tinggal juga dapat dari jenis atap dan dinding terluas. Sama halnya dengan jenis lantai, jenis atap dan dinding juga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga dimana semakin baik kualitas atap dan dinding rumah maka kesejahteraan rumah tangga tersebut akan semakin baik. Di Kabupaten Banggai Kepulauan ini mayoritas rumah tangga menggunakan seng sebagai atap rumah tinggal.

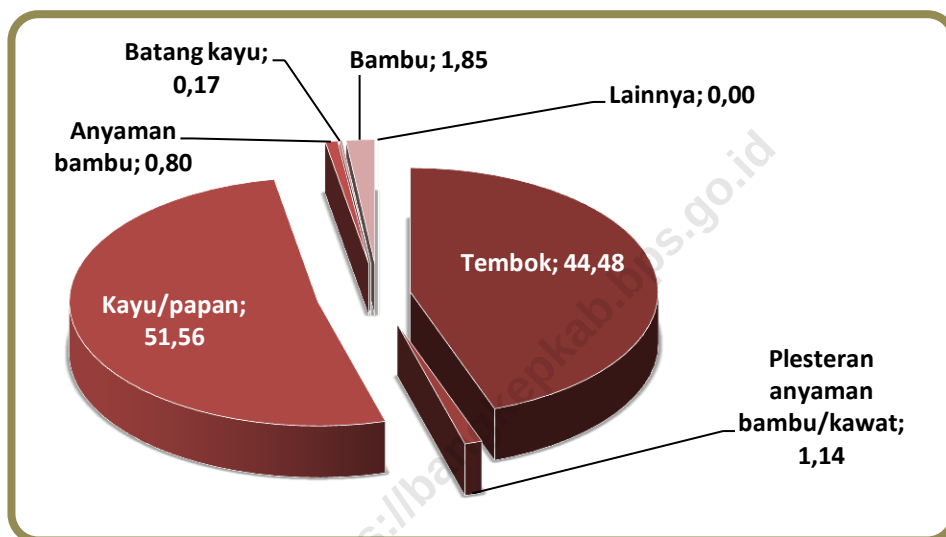
Gambar 6.3.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Rumah
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Sementara itu, berdasarkan material pembentuk dinding terluas, rumah tinggal masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan didominasi oleh dinding kayu/papan. Ada sebanyak 44,48 persen rumah tangga memiliki rumah yang berdinding tembok.

Gambar 6.4.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal masyarakat selain dilihat dari komponen material pembentuk, juga diperlukan fasilitas penunjang sehari-hari seperti sumber air minum bersih, sanitasi yang layak, dan sumber penerangan yang memadai. Kelengkapan fasilitas pokok rumah tinggal akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang kemudian turut menentukan kualitas rumah tinggal tersebut.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang

terus menerus diupayakan pemerintah. Dalam tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, salah satu indikator yang digunakan yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, dalam tujuan keenam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, ketersediaan sumber air minum layak dan berkelanjutan ini juga menjadi salah satu indikator. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya masalah ketersediaan air minum layak bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.1.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Sumber Air Minum
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020

Sumber Air Minum Bersih		Sumber Air Minum Layak	
Air Bersih	Tidak	Air Bersih	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
89,74	10,26	64,09	35,91

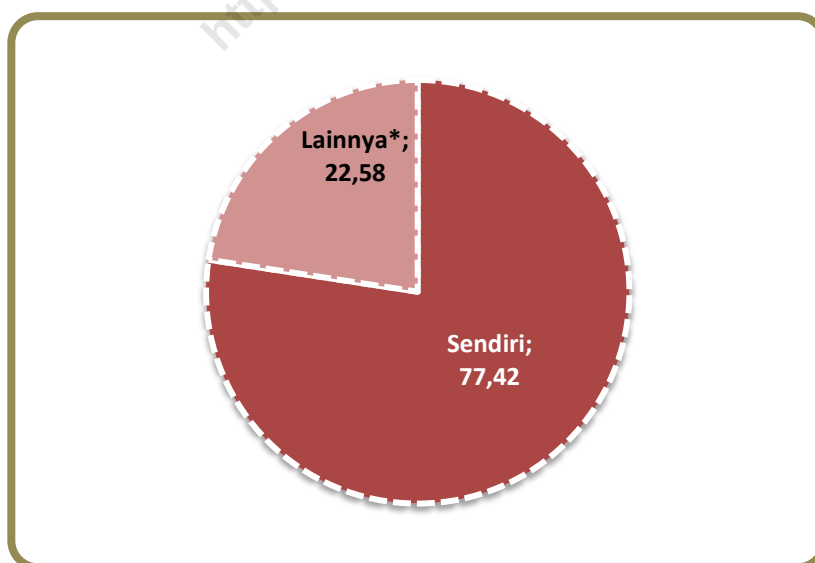
Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, masih terdapat 10,26 persen rumah tangga yang belum menggunakan air minum yang bersih. Sementara itu, dari sisi kelayakan dan keberlanjutan, sebesar 64,09 persen rumah tangga yang menggunakan air minum layak dan berkelanjutan.

Sumber air minum yang layak sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Apabila air minum yang dikonsumsi merupakan

air minum yang tidak layak, maka akan rentan terhadap penyakit khususnya diare. Kondisi tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak – anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak – anak harus tumbuh dengan baik dan sehat agar terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang.

Selanjutnya, fasilitas rumah tangga yang sangat perlu untuk diperhatikan yaitu masalah sanitasi, salah satunya yaitu ketersediaan sarana jamban. Apabila ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air yang berujung pada tingkat kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Di Kabupaten Banggai Kepulauan hingga tahun 2020, masih terdapat 22,58 persen rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar sendiri (termasuk yang menggunakan MCK umum).

Gambar 6.5.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



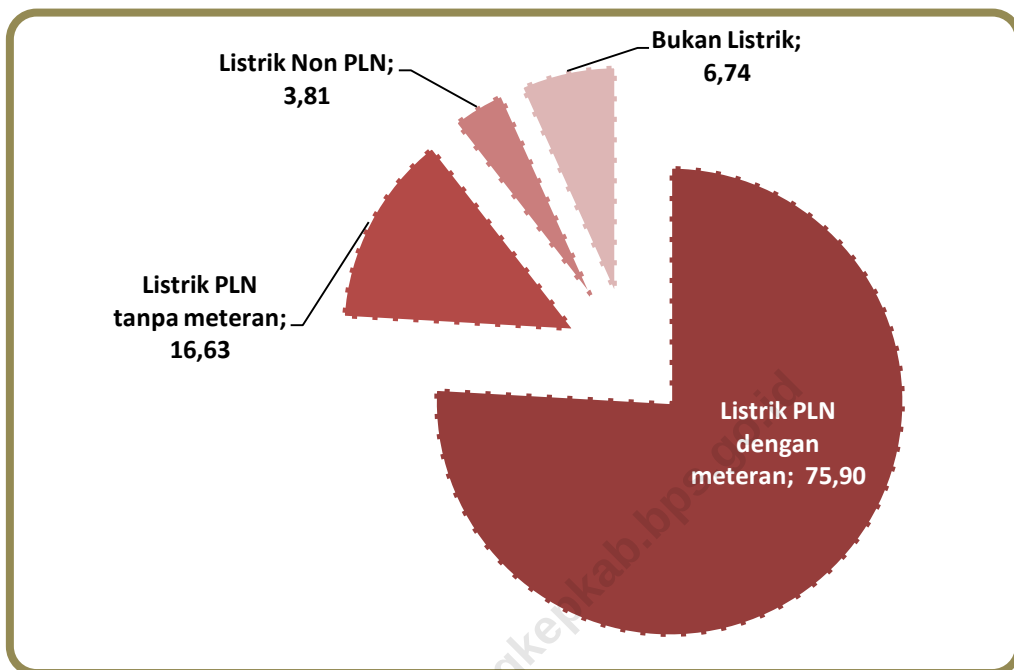
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

*Lainnya termasuk termasuk MCK Umum dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang air besar

Kelayakan fasilitas buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan juga perlu dilihat dari jenis kloset dan tempat pembuangan akhir tinja dimana yang dianjurkan yaitu kloset leher angsa dengan tempat pembuangan tangki septik/SPAL. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, dari rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, sudah 92,10 persen rumah tangga yang sudah menggunakan kloset leher angsa. Sementara itu, menurut tempat pembuangan akhir tinja, 87,84 persen rumah tangga sudah menggunakan tangki dan IPAL, sedangkan sisanya masih menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting yaitu penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Sampai tahun 2020, rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan belum seratus persen telah dijangkau oleh listrik. Adapun rumah tangga yang sudah dijangkau oleh listrik PLN dengan meteran sebesar 75,90 persen, 13,55 persen menggunakan listrik PLN tanpa meteran, 3,81 persen menggunakan listrik tapi bukan PLN dan 6,74 persen menggunakan bukan listrik. Pengusahaan listrik oleh pemerintah melalui PLN terus diupayakan keterjangkauannya hingga ke pelosok daerah.

Gambar 6.6.
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

POTRET KEMISKINAN

7

POTRET KEMISKINAN

Gambaran kesejahteraan masyarakat paling mudah memang dilihat dari tingkat kemiskinan. Namun, kemiskinan ini sendiri adalah suatu indikator yang multidimensi. Kemiskinan tidak hanya mencakup kondisi ekonomi, akan tetapi kondisi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan seperti menjadi mata rantai yang dapat menjadi sebab dan sekaligus menjadi akibat dari masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya. Tidak hanya pada level mikro, masalah kemiskinan ini juga berimbas pada kondisi sosial dan ekonomi secara makro.

Berpengaruhnya masalah kemiskinan terhadap pembangunan menjadikan masalah kemiskinan ini sering dikaitkan dengan masalah-masalah nasional lainnya. Tidak heran jika kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di berbagai negara lain pun demikian. Dalam kesepakatan dunia internasional, pengentasan kemiskinan ini menjadi tujuan pertama dalam SDGs. Hal ini menjadi bentuk kepedulian dunia internasional terhadap masalah kemiskinan.

Kemiskinan memiliki banyak sudut pandang. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2020).

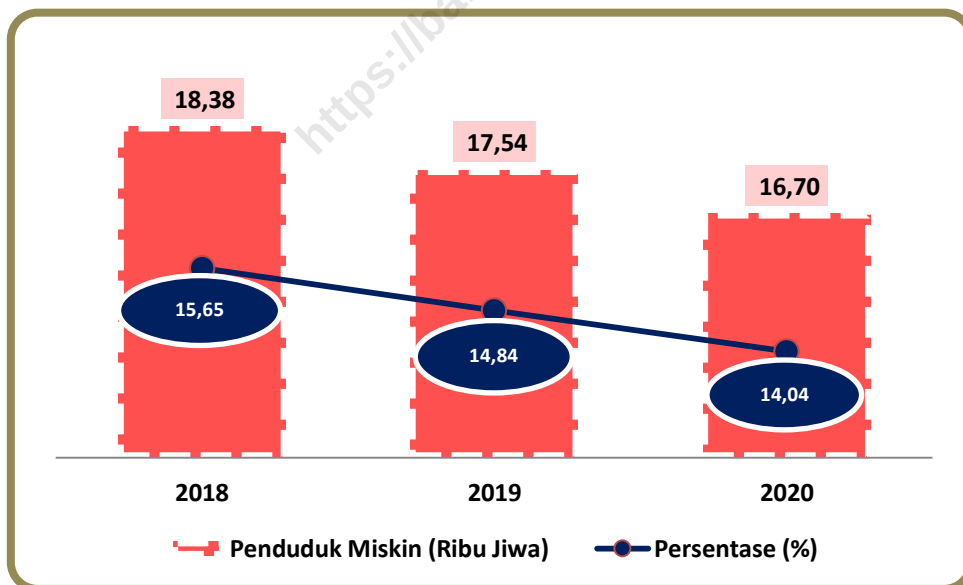
Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Indikator kemiskinan ini sangat identik dengan pendapatan penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan

pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Pemerintah selaku perancang dan pengambil kebijakan terus berupaya merumuskan paket-paket kebijakan terkait pengentasan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Pengentasan masalah kemiskinan ini memang tidak mudah. Kemiskinan ini seperti lingkaran yang membelenggu dimana kemiskinan ini bisa menjadi sebab sekaligus menjadi akibat dari rendahnya kualitas kehidupan manusia. Kompleksnya masalah kemiskinan ini, menjadikan masalah ini tidak mudah untuk dituntaskan.

Gambar 7.1.
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan,
Maret 2017 - 2019



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018-2020

Pengentasan kemiskinan ini sesungguhnya telah diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam program yang telah direncanakan baik di level

nasional maupun daerah. Selama periode 2018-2020, persentase kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan di Maret tahun 2018 kemudian turun kembali di Maret tahun 2019 hingga Maret 2020.

Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Pembahasan kemiskinan tidak hanya seputar jumlah, persentase, dan perkembangannya. Indikator yang juga perlu diperhatikan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 7.1.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2018 – 2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)
(1)	(2)	(3)
2018	2,65	0,61
2019	1,98	0,40
2020	1,99	0,47

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 – 2020

Berdasarkan nilai P1 dan P2 di Kabupaten Banggai Kepulauan sepanjang tahun 2018-2020, tampak adanya perubahan angka yang tidak begitu signifikan pada tahun 2020.

<https://bangkepkab.bps.go.id>

INDIKATOR SOSIAL LAINNYA

8

INDIKATOR SOSIAL LAINNYA

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini tampak merubah banyak hal dalam tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari konsidi sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya.

Seiring dengan perubahan yang terjadi, tingkat kebutuhan manusia mulai mengalami pergeseran, dari yang sebelumnya merupakan kebutuhan sekunder atau tersier, kini telah berubah menjadi kebutuhan primer. Contoh sederhana seperti kebutuhan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, berlibur atau berwisata, bahkan eksistensi di tengah masyarakat pun kini menjadi kebutuhan. Hal-hal tersebut tidak lagi terpisahkan dalam kehidupan masyarakat secara umum sehingga menjadi wajar apabila indikator sosial semacam itu kini menjadi salah satu pengukuran perkembangan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Menjadi Kebutuhan Primer

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini berkembang begitu pesat. Perkembangan ini menjadi salah satu pendorong arus globalisasi. Di era TIK yang semakin canggih dan mudah diakses, jarak tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar individu maupun antar lembaga atau usaha. Ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses terhadap TIK ini akan mempengaruhi pergerakan manusia dalam berbagai urusan, baik itu urusan antar individu, urusan pemerintahan, bisnis, politik, serta urusan yang lainnya. Secara otomatis, akses terhadap TIK ini menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan suatu daerah.

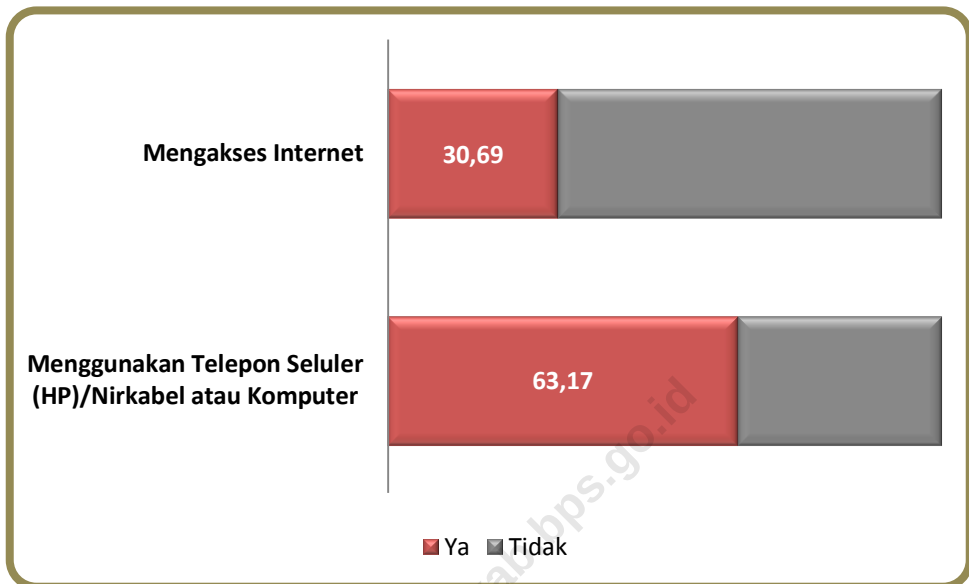
Salah satu tantangan pembangunan negara yang luas seperti Indonesia ini yaitu penyediaan layanan infrastruktur yang merata untuk memudahkan konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain secara cepat. Layanan infrastruktur yang dibutuhkan ini tidak hanya tentang pembangunan secara fisik seperti jalan dan transportasi, akan tetapi infrastruktur pendukung akses terhadap TIK juga sangat penting untuk diprioritaskan.

Kemajuan TIK ini memberikan manfaat yang sangat positif bagi masyarakat. Jika ini dapat dikembangkan dengan optimal, akan dapat mengdongkrak kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan TIK, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses TIK, diharapkan kehidupan akan terus bergerak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Dahulu kala, kepemilikan alat TIK seperti *handphone* dan komputer hanya terbatas pada kalangan ekonomi kelas atas. Di sebagian besar masyarakat, TIK ini sebagai barang mewah yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun, kini kebutuhan akan TIK sudah menjadi kebutuhan primer dan bahkan *handphone* menjadi bagian dari gaya hidup semua kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin terjangkau harga *smartphone* dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet. Masyarakat semakin mudah mengakses segala informasi yang diinginkan.

Pada tahun 2020, persentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler atau komputer sebanyak 63,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 lebih dari setengah penduduk berumur lima tahun ke atas di Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan akses telepon seluler/komputer.

Gambar 8.1.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut
Beberapa Akses Terhadap TIK di Kabupaten Banggai Kepulauan, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Berbeda dengan penggunaan telepon seluler atau komputer, akses internet menunjukkan angka yang lebih kecil. Persentase penduduk yang mengakses internet di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 hanya 30,69 persen. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat membutuhkan akses internet, hanya pekerjaan dan urusan tertentu saja yang memanfaatkan internet. Sementara untuk telepon seluler penggunaannya lebih mudah dioperasikan, lebih terjangkau, mobilitasnya juga lebih mudah, dan sebagian besar hanya digunakan untuk komunikasi.

Seiring perkembangan arus informasi yang bergerak cepat dimana sebagian masyarakat membutuhkannya untuk menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, maupun hiburan, penggunaan telepon seluler ini sangat diminati masyarakat. Hal ini mengundang para vendor telepon seluler untuk berlomba-lomba menguasai pasar.

Akses TIK lainnya yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, keterkaitannya dengan penggunaan komputer dan telepon seluler yaitu penggunaan internet. Dengan menggunakan internet, masyarakat tidak hanya dapat menjangkau informasi di sekitar lingkungan saja, akan tetapi informasi dari seluruh belahan dunia dapat diakses. Internet saat ini menjadi kebutuhan primer di berbagai keperluan, baik itu dunia usaha, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, layanan masyarakat, politik, dan yang lainnya. Dari sisi pemanfaatan, tampak bahwa internet telah digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk mendapatkan informasi/berita dan media social.

<https://bangkepkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan 2020. Salakan: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah 2020. Palu: BPS Provinsi Sulawesi Tengah
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan. 2021. Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2021. Salakan: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banggai Kepulauan 2016 - 2020. Salakan: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN***

Kompleks Perkantoran, Jl. Bukit Trikora, Kec. Tinangkung, 94785
Telp. (0462) 2223881

Homepage: <https://bangkepkab.bps.go.id> Email: bps7201@bps.go.id

ISBN 978-602-0715-28-5 (PDF)

